

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintahan Daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Lingkungan Hidup
4. Pekerjaan Umum
5. Penataan Ruang

6. Perencanaan Pembangunan
7. Perumahan
8. Kepemudaan dan Olah Raga
9. Penanaman Modal
10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11. Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Ketenagakerjaan
13. Ketahanan Pangan
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Keluarga Berencana
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan Informatika
18. Pertanahan
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Sosial
23. Kebudayaan
24. Statistik
25. Kearsipan
26. Perpustakaan

Urutan Pilihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Pariwisata
6. Industri
7. Perdagangan

8. Ketransmigrasian

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berikut diuraikan capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan 5 (Lima) Misi Pembangunan.

Tabel 4.1
Matriks Penyelenggaraan Urusan Wajib
dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014	PELAKSANA URUSAN WAJIB	PELAKSANA URUSAN PILIHAN
Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi	Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Badan Perpustakaan 	-
	Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan RSUD AW. Sjahranie RSUD Kanujoso RSUD Tarakan RSJ Atma Husada 	-
	Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 	-
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan	Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Dinas Sosial Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dinas Pekerjaan Umum (Cipta Karya) Biro Ekonomi Dinas Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan

MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014	PELAKSANA URUSAN WAJIB	PELAKSANA URUSAN PILIHAN
	Prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disperindagkop Dinas Pemuda dan Olahraga 	-
	Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> Disperindagkop (UMKM dan Koperasi) Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> Disperindagkop (perdagangan dan industri)
	Prioritas 6 : Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Peternakan Dinas Perkebunan Disbudpar Disperindagkop (perdagangan dan
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan	Prioritas 7 : Pengembangan Agribisnis	-	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Peternakan Dinas Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan
	Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Badan Ketahanan Pangan Dinas Pekerjaan Umum (Pengairan) 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian Dinas Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perkebunan Disnakertrans (Transmigrasi)
	Prioritas 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	-	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Peternakan
Misi 3 : Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata	Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan Diskominfo 	-

MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014	PELAKSANA URUSAN WAJIB	PELAKSANA URUSAN PILIHAN
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik	Prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan • Biro Keuangan • Biro Pemerintahan • Badan Kepegawaian Daerah • Inspektorat Wilayah • Diskominfo • Bappeda • Kesbangpol 	-
Misi 5 : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim	Prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum (Penataan Ruang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Distamben

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi






Misi pertama ini dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan yaitu “Meningkatkan kualitas SDM Kaltim” dan 5 (lima) sasaran yaitu (1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Meningkatkan Angka Melek Huruf, (3) Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, (4) Meningkatnya Angka Harapan Hidup, (5) Meningkatnya Pendapatan Perkapita.

Capaian pembangunan sumber daya manusia mengalami kenaikan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pada tahun 2012 adalah 76,71 atau peringkat ke 5 secara nasional menjadi 77,33 tahun 2013 atau naik peringkat ke 4 secara nasional.

Dari empat komposit pembentuk IPM yaitu 1) angka melek huruf, 2) rata-rata lama sekolah, 3) angka harapan hidup dan 4) pendapatan per kapita, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

Indikator makro untuk bidang Pendidikan terutama angka melek huruf yang ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 98,40 % realisasinya baru mencapai nilai sebesar 98,64 %, dan rata-rata lama sekolah di tahun 2014 ditargetkan 10 tahun dan realisasinya masih mencapai nilai 9,8 tahun, yang berarti bahwa target untuk tahun 2014 belum mencapai target yang diinginkan, hal ini disebabkan masih adanya daerah perbatasan dan daerah terpencil yang masih belum dapat mengakses pelayanan pendidikan karena keterbatasan transportasi dan minimnya tenaga pendidik yang berminat tinggal di daerah perbatasan dan terpencil.

Tabel 4.2
Capaian Sasaran Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD 2014	CAPAIAN 2013	CAPAIAN 2014	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,01	77,33	77,33	Tercapai	
2.	Angka Melek Huruf (persen)	98,40	97,95	98,64	Tercapai	
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10	9,39	9,60	Akan Tercapai	
4.	Angka Harapan Hidup (tahun)	71,50	71,78	71,78	Tercapai	
5.	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)	46,65	44,10	47,52	Tercapai	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

Upaya pencapaian target misi Pertama ini melalui Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan; Prioritas 2: Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; dan Prioritas 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Capaian kinerja untuk misi pertama sangat menggembirakan dan rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan.

1.1. Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

1.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 1; Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan adalah melalui pelaksanaan 6 program dan 14 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 302,73 Milyar.

Sasaran prioritas ini adalah meningkatnya angka melek huruf dan meningkatnya rata-rata lama sekolah.

Tabel 4.3
Program Kegiatan Prioritas
Terkait Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan			
No	Program / Kegiatan		SKPD
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini		DINAS PENDIDIKAN
	1.1	Pembangunan Gedung Sekolah	
2	Program Wajib Belajar 9 Tahun		
	2.1	Pembangunan Gedung Sekolah Terpadu	
	2.2	Rehab Ruang Kelas	
3	Program Pendidikan Menengah		
	3.1	Pembangunan Gedung Sekolah	
	3.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	
	3.3	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	
	3.4	Pembangunan Education Center	
4	Program Pendidikan Non Formal		
	4.1	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	

5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
	5.1	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	
	5.2	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	5.3	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	
6	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan		BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	6.1	Pemasyarakatan Minat Baca & Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	
	6.2	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	
	6.3	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan” pada tahun 2014 rata-rata mencapai 70,35%. Adapun realisasi dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 dalam upaya pencapaian peningkatan mutu pendidikan berdasarkan program kegiatan prioritas, adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Pembangunan Gedung Sekolah berupa 6 unit Sekolah TK Pembina atau TK Unggulan yaitu TK Pembina Samarinda, TK Kecamatan Samarinda Utara, TK Handayani Samarinda, TK Kecamatan Kab. Paser, TK Kecamatan Kab. Kukar dan TK Kecamatan Kota Bontang.

2. Program Wajib Belajar 9 Tahun

- Pembangunan Gedung Sekolah Terpadu antara lain 7 unit Autis Centre Bontang, SLB Pembinaan Provinsi, SMP 19 Samarinda, SDN 005 Muara Badak, Aula SMPN 1 Samarinda, SLB Bontang, Landscape dan Mushola SMPN 2 Kota Bangun.
- Rehab Ruang Kelas antara lain 2 unit Sekolah yaitu SMP Negeri 10 Samarinda sebanyak 8 ruang kelas dan SDN 015 Tenggarong sebanyak 3 ruang kelas.

3. Program Pendidikan Menengah

- Pembangunan Gedung Sekolah berupa 1 unit SMA Unggulan, Laboratorium, dan ruang kelas baru SMK.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, di SMA Negeri 5 Samarinda sebanyak 8 ruang kelas, SMA Negeri 2 Tenggarong sebanyak 6 ruang kelas dan lapangan upacara, serta 6 ruang kelas di SMK Darussalam Samarinda.
- Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi sebanyak 140 siswa PASIAD, 500 siswa SMAN 10 Samarinda, 20 siswa prestasi ke Dalam Daerah dan 37 siswa prestasi ke Luar Daerah.
- Pembangunan Education Center Tahap II terdiri dari Gedung Laboratorium 9 ruangan, 9 ruang kelas, Asrama sebanyak 32 kamar putra dan 32 kamar putri serta pembangunan Kantin.

4. Program Pendidikan Non Formal

- Pengembangan Pendidikan Keaksaraan melalui pembelajaran keaksaraan tingkat dasar dan lanjutan untuk 300 kelompok atau sejumlah 2.950 warga belajar.

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

- Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi sebanyak 3.820 guru TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Pengawas.
 - Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebanyak 200 orang.
 - Peningkatan Kualifikasi Pendidikan D4 sebanyak 44.009 Guru.
6. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan, melalui kegiatan :
- Pemasyarakatan Minat Baca & Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar berupa pengembangan 8 Jaringan perpustakaan digital dan 173.296 pemustaka terlatih.
 - Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat sebanyak 67 perpustakaan dengan 112 tenaga pengelola perpustakaan dan pustakawan.
 - Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam sebanyak 283 judul bahan pustaka, serta koleksi umum sebanyak 1.741 judul bahan pustaka.

1.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Beasiswa hanya terealisasi 31.497 orang dari target 50.000 orang atau mencapai 62,99%, hal ini disebabkan proses verifikasi calon penerima beasiswa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan lambat.

2. Pembangunan SMA Unggulan berjalan lambat karena terkendala lamanya proses penyelesaian pembebasan lahan, serta adanya lelang ulang.
3. Pelayanan perpustakaan elektronik belum berjalan optimal disebabkan terbatasnya ketersediaan Bandwith untuk mendukung sistem layanan elektronik pengunjung.

b. Solusi

1. Penguatan kapasitas kelembagaan di Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi data calon penerima beasiswa.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di wilayah perbatasan dengan sistem pemberian insentif yang memadai.
3. Meningkatkan kapasitas jaringan sistem perpustakaan elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi bahan pustaka.
5. Mengembangkan fasilitas layanan perpustakaan keliling.
6. Optimalisasi pemasaran dan promosi perpustakaan pada kalangan anak-anak dan remaja serta masyarakat umum, melalui pameran buku dan festival perpustakaan.

1.2. Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Komposit IPM selanjutnya adalah bidang kesehatan yang ditunjukkan dengan angka harapan hidup telah mencapai 71,78 tahun melampaui target 71,5 tahun. Kenaikan angka harapan hidup di Kalimantan Timur karena Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

1.2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 2; Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan adalah melalui pelaksanaan 7 program dan 15 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 104,82 Milyar. Sasaran prioritas ini adalah meningkatnya angka harapan hidup.

Tabel 4.4
Program Kegiatan Prioritas terkait
Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan			
No	Program / Kegiatan		SKPD
1	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular		DINAS KESEHATAN
	1.1	Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	
	1.2	Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah	
2	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM		
	2.1	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit/Kedokteran Umum	RSUD A. WAHAB SYAHRANIE
	2.2	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
	2.3	Pembangunan Rumah Sakit	RSUD A. WAHAB SYAHRANIE, RSUD KANUJOSO
	2.4	Pembangunan Rumah Sakit Pratama	DINKES KAB/KOTA (BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE KAB/KOTA)
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		DINAS KESEHATAN
	3.1	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	
	3.2	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	
	3.3	Penyediaan Calon Tenaga Kerja Keperawatan	

	3.4	Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Narkoba	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
4	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		DINAS KESEHATAN
	4.1	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	
	4.2	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	
5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		DINAS KESEHATAN, RSUD A.WAHAB SYAHRANIE, RSUD TARAKAN
	5.1	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	
6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		DINAS KESEHATAN
	6.1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
7	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
	7.1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan” pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 82,08%. Adapun realisasi dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas layanan kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, meliputi kegiatan :
 - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular melalui pemberian pengobatan ARV/Profilaksis untuk penderita HIV telah mencapai target yang diharapkan yaitu 85 %, sehingga persentase pencapaian sebesar 108,39 %. Jumlah ini juga meningkat dari tahun

sebelumnya tahun 2013 pasien ODHA yang mendapatkan ARV hanya sebesar 74,82%.

- Pengadaan dan pendistribusian kelambu berinsektisida, dengan adanya kegiatan ini berhasil menurunkan angka Annual Parasite Incidence (API) malaria dari 0,75 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 0,54 per 1000 penduduk di tahun 2014, dan angka tersebut melampaui target yang ditetapkan di tahun 2014 yaitu sebesar 1,5 per 1000 penduduk, atau mencapai 281,4% dari target yang ditetapkan.
 - Penjaringan penderita Tuberculosis (TB) melalui surveillance telah menghasilkan angka notifikasi kasus TB di Provinsi Kalimantan Timur 131 per 100.000 penduduk, mencapai 92,9% dari target yang diharapkan yaitu 141 per 100.000 penduduk di tahun 2014.
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM, meliputi kegiatan :
- Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit/Kedokteran Umum di Rumah Sakit Umum Daerah.
 - Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit Umum Daerah.
 - Pembangunan ruang Radiologi Rumah Sakit.
 - Pembangunan Rumah Sakit Pratama sebanyak 3 (tiga) Rumah Sakit di Talisayan Kabupaten Berau, Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, dan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, melalui bantuan keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota.
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi kegiatan :
- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat, melalui kegiatan Promosi dan pameran kesehatan.

- Peningkatan peran instansi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan memasyarakatkan pola hidup sehat, dengan kegiatan penilaian posyandu, desa siaga dan Rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dengan hasil capaian rumah tangga ber-PHBS tahun 2014 sebesar 54% meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 52,2%, walaupun masih berada dibawah target 55% di tahun 2014.
 - Penyediaan calon tenaga kerja keperawatan melalui kegiatan akademi keperawatan yang berhasil menyediakan tenaga perawat sebanyak 325 orang di tahun 2014.
 - Penyuluhan kesehatan jiwa dan narkoba di kabupaten/kota.
4. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, meliputi kegiatan :
- Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat dimana sebanyak 100% proporsi penduduk telah memiliki Jaminan Kesehatan.
 - Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis melalui bimbingan teknis sebanyak 125 orang.
5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, meliputi kegiatan :
- Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan melalui pendampingan akreditasi di 15 (lima belas) Puskesmas Kabupaten/Kota.
 - Identifikasi dan verifikasi standar pelayanan puskesmas berdasarkan Pergub Kaltim nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Puskesmas 24 jam di Provinsi Kalimantan Timur, telah teridentifikasi sebanyak 37 Puskesmas 24 jam yang telah memiliki standard

Pratama dari 110 Puskesmas yang ada atau baru mencapai 33,64%, tidak mencapai target 99 Puskesmas 24 jam.

- Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, melalui kegiatan dokter terbang ke daerah perbatasan/daerah terpencil.
6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, melalui kegiatan :
- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita melalui kegiatan pelatihan tenaga kesehatan terlatih 67 orang, dan cakupan Pelayanan Kesehatan Anak balita mencapai 53,21% melampaui target 2014 sebesar 50%.
7. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak, melalui kegiatan :
- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Reproduksi, melalui kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan reproduksi terpadu bagi calon pengantin, sosialisasi kemampuan dan keterampilan kader dalam pendampingan resiko tinggi ibu hamil, dan pelatihan tenaga kesehatan sebanyak 79 orang. Kondisi saat ini terjadi penurunan kasus kematian ibu sebesar 12,8%, dimana pada tahun 2013 sebanyak 125 kasus dan turun pada tahun 2014 menjadi 109 kasus.

1.2.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Belum terpenuhinya standard puskesmas 24 jam di beberapa puskesmas yang diusulkan menjadi Puskesmas 24 Jam, disebabkan ketersediaan dokter yang tidak mencukupi kebutuhan minimal yaitu 2 (dua) orang, dan hal ini juga menyebabkan puskesmas tersebut belum mampu menjadi

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED). Sementara rekrutmen tenaga dokter masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

2. Target 7 (tujuh) lokasi Rumah Sakit Pratama belum tercapai karena adanya hambatan dan kendala pembangunan rumah sakit pratama yang terkait dengan keterbatasan material, ketidaksiapan lahan, dan pemindahan lokasi, serta belum adanya dokumen perencanaan.
3. Kondisi dan status Kesehatan Perempuan Indonesia masih rendah hal ini terlihat dari beberapa indikator Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini masih tertinggi dibanding negara-negara lain di ASEAN. Permasalahan tersebut disebabkan oleh permasalahan seperti status kesehatan reproduksi, status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, pendidikan, tingkat ekonomi keluarga yang rendah serta status dan kedudukan perempuan yang rendah dalam keluarga dan masyarakat. Isu lain adalah rentannya perempuan terhadap Penyakit menular (HIV/AIDS) terutama daerah padat penduduk, perbatasan dan daerah wisata karena kurangnya pengetahuan HIV/AIDS dan kurangnya akses pelayanan pencegahan dan Kekerasan terhadap perempuan.

b. Solusi

1. Koordinasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan terkait usulan rekrutmen dan pendistribusian tenaga kesehatan terutama dokter untuk puskesmas di Kabupaten/Kota.
2. Percepatan penyelesaian lokasi dan lahan untuk pembangunan rumah sakit pratama yang representatif dengan melakukan perencanaan dan survey terlebih dahulu.

3. Peningkatan upaya validasi database jumlah masyarakat kurang mampu yang berhak menerima jaminan pelayanan kesehatan.

1.3. Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan merupakan salah satu komponen upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, yang diukur melalui peningkatan pendapatan perkapita.

Sasaran prioritas ini meliputi; Meningkatnya pendapatan perkapita dan Meningkatnya daya beli masyarakat. Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) tidak terlepas dari adanya peningkatan komposit daya beli masyarakat melalui pendapatan per kapita yang telah pula mencapai Rp 47,52 juta melampaui target Rp 46,65 juta di tahun 2014.

1.3.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 5; Pengembangan Ekonomi Kerakyatan adalah melalui pelaksanaan 2 program dan 7 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,65 Milyar.

Tabel 4.5.
Program Kegiatan Prioritas
Terkait Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		DISNAKERTRANS
	1.1	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	
	1.2	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	
	1.3	Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	

2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		BPPKB
	2.1	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	
	2.2	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usahabagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 75,44%. Adapun capaian hasil masing-masing program prioritas “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”, adalah sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, meliputi kegiatan :
 - Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di 78 Perusahaan dan sertifikasi Tenaga ahli K3 sebanyak 160 orang.
 - Peningkatan fungsi - fungsi Lembaga - lembaga Ketenagakerjaan di 3 lembaga Tenaga Kerja.
 - Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 33 kasus Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah mampu meningkatkan Upah Minimum Regional (UMR) dari Rp1.752.073 di tahun 2013 menjadi Rp1.886.315 di tahun 2014, dan menurunkan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari 791 kasus di tahun 2013 menjadi 306 kasus di tahun 2014.

2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, melalui kegiatan :
 - Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender melalui 5 kajian.
 - Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha sebanyak 1.500 orang.

1.3.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang antara lain disebabkan oleh masih adanya berbagai praktik diskriminasi terhadap perempuan. Masih terjadi kesenjangan pada tingkat Partisipasi Angkatan kerja, Tingkat upah yang diterima, kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja diluar negeri, pekerja tak dibayar dan pekerja informal. Pekerjaan perempuan disektor informal biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai.
2. Pelaksanaan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Dewan Pengupahan Provinsi belum berjalan optimal karena keterbatasan waktu dan biaya operasional yang tinggi.

b. Solusi

1. Peningkatan fungsi Lembaga Ketenagakerjaan dalam hubungan industrial dan pengupahan
2. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan membentuk tim terpadu dan terintegrasi dalam bimbingan dan pendampingan kepada kelompok usaha perempuan.











Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan

Misi kedua “Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan” menekankan pada dua tujuan yaitu “Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat” dengan sasaran 1) menurunnya tingkat pengangguran dan 2) tingkat kemiskinan.

Capaian indikator pembangunan dalam rangka menurunkan angka pengangguran telah mencapai 7,53% lebih rendah dari target pada tahun 2014 yaitu 8%. Akan Tetapi capaian indikator pembangunan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2014 yang ditargetkan sebesar 6% dalam ternyata mencapai 6,42%. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh adanya migrasi penduduk dari luar Kalimantan Timur yang pada umumnya berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan kerja dan sulit mendapatkan pekerjaan menjadikan jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Di samping itu, meningkatnya inflasi sehingga mempengaruhi perubahan garis kemiskinan pada periode bulan Maret 2013 – Maret 2014 meningkat sebesar 3,27% khususnya dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan kontribusi sebesar 71,67% terhadap Garis Kemiskinan, sehingga masyarakat yang semula berada pada posisi rentan miskin akhirnya menjadi miskin.

Pelaksanaan Misi 2 pembangunan di Kalimantan Timur dijabarkan melalui upaya pencapaian Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan; Prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; dan Prioritas 6 : Transformasi Ekonomi.

Tabel 4.6.
Capaian Sasaran Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan
Berbasis Sumberdaya Alam dan Energi Terbarukan

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2014	CAPAIAN TAHUN 2014	STATUS CAPAIAN	
1.	Tingkat Kemiskinan	6,00 %	6,42 %	Tidak Tercapai (Off Track)	
2.	Tingkat Pengangguran	8,00 %	7,53 %	Tercapai (achieve)	
3.	Tingkat Inflasi	6,00 + 1	7,66%	Tidak Tercapai (Off Track)	
4.	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,35	0,3341	Akan tercapai (On Track)	
5.	Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity)	Rp 698.622	Rp 653.700	Akan tercapai (On Track)	
6.	Pertumbuhan Ekonomi				
	- Migas	2,3 - 3,2	2,02	Tercapai (achieve)	
	- Non Migas	5,5 – 6,3	5,86	Tercapai (achieve)	
7.	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	6,3 %	6,24 %	Akan Tercapai (On Track)	
8.	Rasio Pemenuhan Beras	73	71,2	Tidak Tercapai (Off Track)	
9.	Bauran Energi baru terbarukan	0,02	0,5	Tercapai (achieve)	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.1. Prioritas 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan

2.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 3; Percepatan Pengentasan Kemiskinan adalah melalui pelaksanaan 13 program dan 17 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 195,71 Milyar. Sasaran prioritas ini adalah Menurunnya Tingkat Kemiskinan.

Tabel 4.7.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)		BIRO PEREKONOMIAN
	1.1	Fasilitasi Penyaluran Raskin	
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2.1	Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan	
3	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		
	3.1	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	
	3.2	Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya		DINAS SOSIAL
	4.1	Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	
	4.2	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	
	4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		

	5.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	
	5.2	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	
6	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		
	6.1	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	
7	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		
	7.1	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	
8	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
	8.1	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	
9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		
	9.1	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
10	Program Pengembangan Perumahan		DINAS PEKERJAAN UMUM
	10.1	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	
11	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat		DINAS PENDIDIKAN
	11.1	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	
12	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		DINAS KESEHATAN
	12.1	Pelayanan Operasi Katarak	
13	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
	13.1	Kemitraan bagi Pasien Kurang Mampu	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Percepatan Pengentasan Kemiskinan” pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 96,26%. Adapun capaian hasil masing-masing program prioritas “Percepatan Pengentasan Kemiskinan”, adalah sebagai berikut :

1. Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), melalui kegiatan :
 - Fasilitasi Penyaluran Raskin yang ditargetkan untuk 147.718 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 26.589.240 Kg dengan realisasi mencapai 24.561.180 kg per tahun atau sebesar 92,37% untuk 136.451 RTS-PM.
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, melalui kegiatan :
 - Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), di 7 Kabupaten (Berau, Kutim, Kubar, Mahulu, Kukar, Paser dan PPU) meliputi 84 Kecamatan lokasi PNPM Mandiri perdesaan yang berhasil di fasilitasi mencakup 86.429 Rumah Tangga Miskin (RTM). Upaya yang dilakukan meliputi pembangunan sarana prasarana pendukung usaha masyarakat, sarana prasarana air bersih, jalan akses, dan fasilitas umum lainnya, serta bantuan dana simpan pinjam untuk kelompok usaha perempuan di perdesaan.
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, melalui kegiatan :
 - Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa untuk 16 unit BUMDES.

- Fasilitas Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di perdesaan sebanyak 30 UMKM dan 30 Orang pelaku usaha UMKM.
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, meliputi kegiatan :
 - Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin sebanyak 500 Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebanyak 200 Orang.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin 37 KK warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).
 5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, meliputi kegiatan :
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di 7 Kabupaten (Samarinda, Balikpapan, Bontang, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau) sebanyak 180 Orang.
 - Fasilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 472 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
 6. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma sebanyak 855 orang.
 7. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial sebanyak 90 orang.

8. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 - Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha sebanyak 1.500 Orang.
9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak sebanyak 398 orang.
10. Program Pengembangan Perumahan
 - Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu berupa rumah layak huni sebanyak 350 Unit. Sebagai upaya mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat miskin, Pemerintah Provinsi telah membangun 330 Unit ditahun 2014 sebagai upaya untuk menekan persentasi penduduk miskin yang memiliki rumah layak huni dari 12,5% menjadi 13,33% dari target 20%.
11. Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
 - Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (SDM) Melalui Beasiswa untuk 12.256 siswa miskin dari jenjang SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi.
12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - Pelayanan Operasi Katarak sebanyak 1.000 orang.
13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu; telah mencapai target 100% dengan jumlah kepesertaan JAMKESPROV 183.100 orang (yang memiliki kartu Kaltim Sehat).

2.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Penyaluran beras untuk keluarga miskin (RASKIN) belum mencapai target dikarenakan antara lain;
 - Penolakan dari Kabupaten Malinau untuk jenis beras yang disalurkan lebih rendah kualitasnya dari produk beras lokal. Penangguhan RASKIN tahun 2014 di Kabupaten Malinau sesuai surat Bupati Malinau No. 500/54/EKPM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 ;
 - Kondisi geografis di pedalaman dan perbatasan yang masih sulit dijangkau karena keterbatasan Sarana dan Prasarana Transportasi dan tingginya biaya transportasi;
 - Belum siapnya dana pendamping Raskin hingga titik distribusi (SOA/Subsidi Ongkos Angkut) di beberapa Kabupaten/Kota; Terdapat perbedaan data RTS-PM penetapan pusat (TNP2K) dengan data hasil validasi Kabupaten/Kota.
 - Masih adanya tunggakan piutang sehingga Bulog belum dapat menyalurkan raskin untuk bulan berikut.
2. Pembangunan Rumah Layak Huni belum mencapai target karena proses verifikasi data calon penerima bantuan oleh kabupaten/kota berjalan lambat, sehingga waktu yang tersedia tidak cukup untuk penyelesaian pembangunan fisiknya. Disamping itu proses pengadaan barang dan jasa mengalami lelang ulang karena kurangnya minat penyedia jasa dalam pembangunan rumah layak huni.
3. Pelaksanaan fasilitasi PNPM-Mandiri Pedesaan menghadapi kendala keterbatasan jumlah fasilitator karena kurangnya peminat untuk menjadi fasilitator. Di samping itu fasilitator menghadapi permasalahan di dalam pelaksanaan tugasnya menuju lokasi binaan yang kondisi geografisnya

sulit dijangkau karena keterbatasan transportasi dan tingginya biaya operasional. Standarisasi honor dan biaya operasional fasilitator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas fasilitator.

4. Pelaksanaan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial menghadapi kendala terkait dengan verifikasi data rumah tangga sasaran penerima program keluarga harapan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota berjalan lambat, dan data fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya, sehingga bantuan sosial belum optimal. Demikian pula fungsi lembaga pengaduan masyarakat ditingkat desa/kelurahan belum efektif.
5. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam mengelola usaha belum terkoordinasi dengan baik di tingkat kabupaten/kota.

b. Solusi

1. Untuk meningkatkan akurasi data rumah tangga sasaran penerima manfaat dari program kegiatan terkait pengentasan kemiskinan, diperlukan pengembangan database penduduk miskin sesuai dengan kriteria BPS dengan mengefektifkan lembaga khusus untuk verifikasi data di lapangan, agar program kegiatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
2. Meningkatkan peran kabupaten/kota dalam pengembangan infrastruktur pendukung penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan daerahnya masing-masing.
3. Peninjauan kembali (review) rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang telah disusun untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini.

4. Mengembangkan program inisiatif daerah terkait percepatan pengentasan kemiskinan.
5. Optimalisasi peran unit pengaduan dan pelayanan penanganan masyarakat di Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2.2. Prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

2.2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 4; Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja adalah melalui pelaksanaan 5 program dan 14 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52,96 Milyar. Sasaran prioritas ini adalah Menurunkan Tingkat pengangguran .

Tabel 4.8.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja				
No		Program / Kegiatan		SKPD
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			DISNAKERTRANS
	1.1	Pengadaan Bahan Dan Materi Pendidikan Dan Ketrampilan Kerja		
	1.2	Pendidikan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja		
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
	2.1	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja		
	2.2	Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan		
	2.3	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat		

	2.4	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya	
	2.5	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan		
	3.1	Pementauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	
	3.2	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
4	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha Kecil Menengah		DISPERINDAGKOP
	4.1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Industri Olah Raga		DISPORA
	5.1	Pelatihan Kewirausahaan dan Industri Olah Raga	
	5.2	Pelatihan Iptek dan SDM Olah Raga	
	5.3	Pelatihan Kecakapan Hidup	
	5.4	Ekspo Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja” pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 78,85%. Adapun capaian hasil masing-masing program prioritas “Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja”, adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja, melalui kegiatan :
 - Pembangunan Balai Latihan Kerja Industri dengan output 1 (satu) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Kutai Barat (Pekerjaan Struktur)
 - Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja dengan output 3.036 Orang pencari kerja.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, melalui kegiatan :
 - Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dengan output penyelenggaraan *Job Market Fair* (JMF) sebanyak 3 kali.
 - Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan dengan output 400 orang pencari kerja.
 - Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat dengan output Pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 120 orang.
 - Perluasan Kesempatan Kerja dengan output Padat Karya kepada 525 orang Pengangguran.
 - Koordinasi Penyusunan Rencana Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja dengan output dapat menempatkan pencari kerja sebanyak 834 orang.
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha Kecil Menengah, melalui kegiatan :
 - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dengan output 1.240 orang yang dilatih di 9 kabupaten dan 31 kecamatan.
 - Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi berupa Jumlah UMKM yang di fasilitasi/pendampingan dengan menghasilkan dokumen perencanaan UKM center di 3 kabupaten yaitu di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Paser.
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Industri Olah Raga, melalui kegiatan :
 - Pelatihan Kewirausahaan dan Industri Olah Raga dengan output 60 orang yang dilatih.
 - Pelatihan Iptek dan SDM Olah Raga dengan output 80 orang pemuda.
 - Pelatihan Kecakapan Hidup dengan output 80 orang pemuda.

2.2.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara umum pencapaian target program-program dan sasaran pengurangan angka pengangguran dapat tercapai. Namun untuk dapat lebih mengoptimalkan program-program pemerintah dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah pengangguran kedepan masih ditemukan permasalahan seperti :

1. Program Penciptaan Wirausahawan baru yang dilaksanakan di beberapa SKPD belum terintegrasi.
2. Target akhir program Penciptaan Wirausahawan baru masih berorientasi pada output jumlah orang yang dilatih tanpa ada tindaklanjut pasca pelatihan.
3. Sistem informasi data yang menyajikan informasi secara spasial maupun sektoral terkait calon wirausahawan baru belum terhimpun dan terstruktur secara baik
4. Keterlibatan pihak swasta/dunia usaha dalam mengurangi angka pengangguran belum optimal.
5. Pencari kerja yang berasal dari lulusan pendidikan di Kaltim masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
6. Pejabat fungsional pengantar kerja jumlahnya masih kurang sehingga mengakibatkan penempatan pencari kerja belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
7. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) masih banyak yang belum memiliki standar pelatihan atau belum terakreditasi
8. Mediasi hubungan industrial dengan tenaga kerja belum berjalan optimal dikarenakan terbatasnya pejabat fungsional mediator di Provinsi Kalimantan Timur yang hanya berjumlah 44 orang.
9. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan belum maksimal karena keterbatasan jumlah tenaga pejabat fungsional pengawas dan kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta masih lemahnya

peran kabupaten/kota dalam upaya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

b. Solusi

1. Integrasi Program Pengembangan Kewirausahaan yang diatur melalui Forum Koordinasi secara intensif.
2. Perlu disusun petunjuk teknis yang baku dan terukur tentang pelaksanaan program penciptaan wirausahawan baru.
3. Menyusun sistem informasi calon wirausahawan baru baik secara sektoral maupun spasial yang terstruktur sebagai bahan dasar dalam menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja program penciptaan wirausahawan baru.
4. Perlu disusun program-program yang bersifat stimulant maupun pendorong bagi pihak swasta/dunia usaha untuk dapat menciptakan lowongan kerja/peluang kerja baru.
5. Meningkatkan kualitas/Kompetensi pencari Kerja melalui pelatihan dan pemagangan kerja.
6. Meningkatkan peran sektor riil (Koperasi dan UMKM) dalam perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas/kapabilitas koperasi dan UMKM.
7. Meningkatkan jumlah pejabat pengantar kerja untuk memfasilitasi antara pengguna (perusahaan) dengan pencari kerja sehingga pencari kerja dapat ditempatkan sesuai kompetensi.
8. Meningkatkan pembinaan, kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pelatihan ketenagakerjaan swasta (LPKS) sehingga kompetensi terpenuhi sesuai kebutuhan pasar kerja.
9. Peningkatan sarana dan prasarana UPTD BLKI yang sesuai kebutuhan pelatihan dan pasar kerja.
10. Optimalisasi penyediaan informasi kerja melalui Bursa Kerja Online (BKOL).

11. Rekrutmen pejabat fungsional mediator dan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan, dan melakukan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi mediator dan pengawas.
12. Meningkatkan koordinasi antara Dewan Pengupahan Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan melibatkan BPS Provinsi, Kabupaten/Kota serta penyedia anggaran sesuai kebutuhan sehingga hasil survey didukung oleh data yang akurat.
13. Meningkatkan peran kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

2.3. Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

2.3.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan adalah melalui pelaksanaan 4 program dan 7 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp19,20 Miliar.

Tabel 4.9.
Program Kegiatan Prioritas terkait Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif		DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI
	1.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
	2.1	Fasilitasi Pengembangan Sarana Hasil Produksi	
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
	3.1	Pengembangan Klaster Bisnis	
	3.2	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi	

	3.3	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
	3.4	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
	4.1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 69,73%. Adapun realisasi dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 dalam upaya pencapaian “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”, adalah sebagai berikut :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, melalui kegiatan :
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam bentuk pendampingan Koperasi unggulan di 10 Kabupaten/Kota, Penyusunan Kajian Resi Gudang untuk 10 Kabupaten/Kota, Pelatihan manajemen bagi UMKM dalam pengembangan produk unggulan sebanyak 40 orang, dan Kegiatan pendampingan 50 unit koperasi dan UMKM.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, melalui kegiatan :
 - Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi berupa 30 UMKM yang di fasilitasi promosi Paviliun Kalimantan Timur di SME Tower Jakarta dan di UKM Center Kabupaten Nunukan, dokumen perencanaan UKM center di 3 kabupaten yaitu di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Paser.

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui kegiatan :
 - Diklat Penilaian Kesehatan KSP/USP se-Kalimantan Timur sebanyak 45 orang dalam rangka meningkatkan pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dan laporan hasil Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - Kajian inisiasi program OVOP melalui pendekatan *key performance indicator* dan *key success* untuk pengembangan klaster bisnis.
 - Perencanaan pembangunan 4 pasar tradisional (Kabupaten Kubar di Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Muarapahu, Kecamatan Penyinggahan dan Kota Samarinda di Kecamatan Makroman).
 - Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah sebanyak 7 pameran UMKM di Samarinda, Balikpapan, Medan, Jakarta, Batam, Malang dan luar negeri.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, melalui kegiatan :
 - Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi, koordinasi atas permodalan melalui program sertifikasi tanah, pelaksanaan hari koperasi nasional, sosialisasi program perkuatan di Kota Samarinda dan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pokja Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

2.3.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara umum pencapaian target program-program dan sasaran pemberdayaan ekonomi kerakyatan telah tercapai. Namun untuk dapat lebih mengoptimalkan program-program pemerintah dalam

memberdayakan sektor riil (koperasi dan UMKM) kedepan masih ditemukan permasalahan seperti :

- Program-program pemberdayaan koperasi belum mengarah pada penciptaan koperasi yang berkualitas atau masih berorientasi pada jumlah koperasi.
- Penentuan target lokasi dan target kelompok sasaran belum didasarkan atas hasil analisa data.
- Program promosi produk koperasi dan UMKM belum dikemas berdasarkan pada kelayakan dan kualitas produk yang akan dipromosikan maupun pertimbangan permintaan pasar.

b. Solusi

- Program-program pemberdayaan koperasi diarahkan terintegrasi dengan program pemberdayaan UMKM dan penciptaan wirausahawan baru.
- Perlu dibangun sistem informasi data yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah yang terkait dengan koperasi dan UMKM.
- Perlu dilakukan verifikasi terhadap rencana-rencana promosi produk koperasi dan UMKM baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2.4. Prioritas 6 : Transformasi Ekonomi

2.4.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 6 : Transformasi Ekonomi adalah melalui pelaksanaan 5 program dan 13 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 33,83 Milyar.

Tabel 4.10.
Program Kegiatan Prioritas terkait Transformasi Ekonomi

Prioritas 6 : Tranformasi Ekonomi			
No	Program / Kegiatan		SKPD
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
1.1	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi		
1.2	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah		
1.3	Kajian Kebijakan Penanaman Modal		
1.4	Penyusunan dan Perencanaan Pengembangan investasi		
1.5	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal		
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		
2.1	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah		
2.2	Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA		
2.3	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal		
2.4	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		
2.5	Penyelenggaraan Pameran Investasi		
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		DISPENDA
3.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah		
4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		
4.1	Penyusun an Sistem Informasi terhadap Layanan Publik		
5	Program Pembentukan Kawasan/Sentra Ekonomi		BIRO EKONOMI
5.1	Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Kariangau		

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Transformasi Ekonomi” pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 77,44%. Adapun realisasi dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 dalam upaya pencapaian “Tranformasi Ekonomi”, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, melalui kegiatan :
 - Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani (MoU):
 - o Kerjasama antara BPPMD Prov. Kaltim dengan BPMD Provinsi Jawa Tengah ;
 - o *Letter of Intent* antara Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan *International Enterprise Singapore*
 - o *Memorandum Of Understanding* antara Pemerintah Kalimantan Timur dan PT. Magma Bio Energi International (Korea Selatan)
 - Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah: Pemuktahiran/updating data pada Simpedal pendataan perusahaan di Kalimantan Timur secara elektronik guna mempermudah dalam pengendalian rencana dan realisasi investasi, perusahaan yang terdata terdapat 139 perusahaan.
 - Kajian Kebijakan Penanaman Modal : Telah menyelesaikan kajian kebijakan perencanaan penanaman modal/ peningkatan bahan mengenai potensi daerah yaitu Peraturan Gubernur Mengenai RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal).
 - Penyusunan dan Perencanaan Pengembangan investasi : Telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sinkronisasi

program/kegiatan tentang Penanaman Modal Se-Kalimantan Timur dan Se- Kalimantan Utara.

- Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan jumlah ijin yang diterbitkan oleh PTSP sebanyak 65 ijin.
- Capaian pembangunan di Kalimantan Timur di bidang daya saing ekonomi daerah, dalam rangka mendukung meningkatkan realisasi investasi Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur, di Bidang Penanaman Modal, berupa PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) terjadi peningkatan sebesar 14.43% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013.
- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berupa data/informasi potensi unggulan Provinsi/Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Potensi Unggulan Daerah (SIPID) realisasi berupa 400 booklet/buku.
- Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi; Terpantaunya pembinaan, pengawasan kegiatan perusahaan PMA dan PMDN 39 Koordinasi Kabupaten/Kota dan pusat.
- Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal berupa data perkembangan realisasi proyek PMA/PMDN baik dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi komersial serta proyek PMA/PMDN yang macet dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi komersial terhadap 139 perusahaan.

- Penyelenggaraan Pameran Investasi sebanyak 15 event pameran.
 - Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani (MoU): Perjanjian kerja sama antara BPPMD Provinsi Kalimantan Timur dan BKPPMD Provinsi Jawa Barat, Perjanjian kerja sama antara BPMPD Provinsi Kepulauan Riau. Koordinasi kerjasama bidang investasi telah menghasilkan 12 Perjanjian Kerjasama (MOU).
 - Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan jumlah ijin yang diterbitkan oleh PTSP dengan output 29 ijin.
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, melalui kegiatan :
- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berupa data/informasi potensi unggulan Provinsi/Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Potensi Unggulan Daerah (SIPID).
 - Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA berupa data proyek PMA/PMDN yang diinput menjadi bahan informasi penanaman modal.
 - Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal berupa data perkembangan realisasi proyek PMA/PMDN baik dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi komersial serta proyek PMA/PMDN yang macet dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi komersial
 - Penyelenggaraan Pameran Investasi sebanyak 12 event.

2.4.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Belum maksimalnya realisasi investasi banyak dikarenakan terkendala status kepemilikan lahan yang belum jelas.
2. Profil peluang investasi yang ditawarkan pada event-event promosi investasi belum memberikan informasi yang rinci dari sisi bisnis.
3. Kualitas, kecepatan, dan ketepatan waktu pelayanan pada masyarakat, dunia usaha utamanya dalam hal perijinan investasi belum efektif dan efisien.

b. Solusi

1. Terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang tata ruang dan peruntukkan lahan.
2. Menyusun dokumen kajian yang dapat memberikan informasi potensi dan peluang bisnis yang komprehensif terkait dengan pengembangan investasi komoditi unggulan daerah.
3. Peningkatan kualitas, kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan dengan upaya-upaya :
 - Penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme pelayanan perijinan;
 - Peningkatan sistem informasi manajemen, sarana dan prasarana.

2.5. Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan

2.5.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 8: Peningkatan Produksi Pangan adalah melalui pelaksanaan 4 program dan 11 kegiatan prioritas dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 87,31 Milyar. Sasaran prioritas ini adalah Tercapainya Swasembada Pangan.

Tabel 4.11.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Peningkatan Produksi Pangan

Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan		
No	Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.1	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	
1.2	Pembangunan Jaringan Tata Air Daerah Rawa	
1.3	Pembangunan Reservoir	
2	Program pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
2.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	
2.2	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	
2.3	Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan	
3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
3.1	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	
3.2	Pengembangan cadangan pangan daerah	
3.3	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
4.1	Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agribisnis	
4.2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas 8 “Peningkatan Produksi Pangan” pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 82,24%. Adapun capaian hasil pembangunan Prioritas “Peningkatan Produksi Pangan”, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, melalui kegiatan :
 - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun berupa Bangunan bendungan D.I. Semurut, Bangunan jaringan irigasi D.I Biatan, Bangunan jaringan irigasi D.I Labanan, dan Bangunan jaringan irigasi D.I Merancang.
 - Pembangunan Jaringan Tata Air Daerah Rawa berupa Pembangunan daerah Rawa Tabalar Muara.
 - Pembangunan Reservoir Bangunan Bendungan Marangkayu.
2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, melalui kegiatan :
 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan, Jumlah BPP yang Fungsional 50 BPP/Kecamatan (90 Orang Penyuluh).
 - Penyuluh Dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan, Jumlah Pendampingan 8 Orang Pendamping, 300 Orang Petani.
 - Pemberdayaan Dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan berupa bimbingan dan pembinaan terhadap petani dan kelompok tani (kelembagaan petani) 115 petani.
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), melalui kegiatan :
 - Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, KWT/Dasawisma yang menerima bantuan bibit tanaman, pupuk,

pestisida, polybag/tempat media tanaman dan Bibit Ternak/Ikan untuk 12 Kelompok.

- Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, Jumlah CPP (Stok Beras Provinsi) 123 Ton.
- Pengembangan Lumbung Pangan Desa, Lumbung Pangan 15 Unit dan lantai jemur 4 unit.

4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan :

- Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, Jumlah Petani dan Nelayan yang mengikuti PENAS XIV 2000 Orang.
- Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis, Pelatihan PHT di 6 Kawasan Sentra Tanaman Pangan 150 Orang 7 Kawasan Sentra. Sosialisasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi 5 Kab/Kota.
- Pengembangan Pangan Lokal Kentang Udara melalui uji lapangan di kebun percobaan untuk memperkaya bahan makanan sebagai alternatif pangan lokal.

2.5.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Keterbatasan tenaga penyuluh lapangan.
2. Sebagian besar petani memiliki rata-rata tingkat pendidikan relative masih rendah, hal ini menghambat pada adopsi teknologi dan inovasi di Bidang Pertanian ditambah lagi dengan terbatasnya jumlah petani yang ada bila dibandingkan dengan potensi lahan yang tersedia.
3. Bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan (KRPL) masih belum optimal.
4. Belum terintegrasinya program kegiatan dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah.

b. Solusi

1. Penambahan jumlah tenaga penyuluh lapangan.
2. Optimalisasi bantuan petani dalam pemanfaatan pekarangan (KRPL).
3. mekanisasi pertanian dan peningkatan keterampilan petani.
4. Integrasi program kegiatan lintas wilayah dan lintas sektor.

Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata


Misi ketiga Kaltim Maju 2018 adalah Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata, dengan tujuan Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas. Adapun sasaran pembangunan infrastruktur adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar dengan indikator indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar dimana tahun 2014 ditargetkan sebesar 5,5 dengan kategori cukup.

Indeks kepuasan layanan infrastruktur ini merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi serta memberikan gambaran perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaatnya.

Pemerintah Provinsi pada tahun 2014 melakukan survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) terhadap masyarakat di 10 Kabupaten/Kota dengan hasil sebesar 5,9 dengan kategori cukup. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2013 dimana nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur hanya sebesar 5 dengan kategori cukup puas. Indeks ini terbentuk dari 6 variabel yang masing-masing dihubungkan dengan 5 jenis infrastruktur. Variabel tersebut yakni : ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap

perekonomian. Jenis infrastruktur yang dinilai meliputi jalan dan jembatan, transportasi, air bersih, irigasi, dan perumahan.

Tabel 4.12.
Capaian Sasaran Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	5,5	5,9	Tercapai (achieve)	

Sumber : Kajian Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. BAPPEDA Provinsi Kaltim Tahun 2014

Secara umum dengan adanya penilaian indeks kepuasan layanan infrastruktur ini, telah menggambarkan bahwa masyarakat merasa terbantu dengan produk/output pembangunan infrastruktur saat ini karena sudah lebih baik dari sebelumnya walaupun ketersediaan serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Untuk itu Pemerintah Provinsi terus berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur agar hasilnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan Infrastruktur Dasar diupayakan melalui pencapaian Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar.

3.1. Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

3.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar adalah melalui pelaksanaan 11 program dan 49 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,27 Trilyun.

Tabel 4.13.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.1	Pembangunan Jalan Km. 13 – Pelabuhan Kariangau	
	1.2	Pembangunan Jalan Rifadin – Jembatan Mahulu	
	1.3	Pembangunan Jalan Samarinda – Sangasanga (TPK Palaran)	
	1.4	Pembangunan Akses Jalan Pulau Balang	
	1.5	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam 4 (Jembatan Kembar) Samarinda	
	1.6	Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy	
	1.7	Pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek (400 M)	
	1.8	Tol Balikpapan – Samarinda	
2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		
	2.1	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	
	2.2	Peningkatan distribusi penyediaan air baku	
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
	3.1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	
	3.2	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	
	3.3	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
4	Program Pengendalian Banjir		
	4.1	Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir	
	4.2	Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	
	4.3	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	
	4.4	Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir	
	4.5	Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai	
5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
	5.1	Pemeliharaan jalan di kota Samarinda	
	5.2	Pemeliharaan jalan Harun Nafsi - H.M.Rifaddin	
	5.3	Pemeliharaan jalan P.Suryanata - patung Lembuswana Samarinda	

	5.4	Pemeliharaan jembatan (tersebar se-Kaltim)	DINAS PEKERJAAN UMUM
	5.5	Rehabilitasi Jalan Balikpapan – Samboja	
	5.6	Rehabilitasi Jalan Tanah Grogot – Pondong	
	5.7	Rehabilitasi Jalan Suryanata	
	5.8	Rehabilitasi Jalan Simpang Samboja - Simpang Muara Jawa	
	5.9	Pemeliharaan Jalan Simpang Bentuas - Simpang Muara Jawa	
	5.10	Pemeliharaan Jalan Simpang 3 Sambera - Muara Badak	
	5.11	Pemeliharaan Jalan Barong Tongkok – Melak	
	5.12	Pemeliharaan Jalan Sp. Barong Tongkok - Simpang 3 Damai	
	5.13	Pemeliharaan Jalan Km 5,5 Balikpapan - Kariangau	
	5.14	Pemeliharaan Jalan Tanjung Redeb – Talisayan	
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
	6.1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	
7	Program Peningkatan Pelayanan Publik		
	7.1	Pembangunan Convention Hall	
	7.2	Pembangunan Pasar Tradisional	
	7.3	Penataan Tepian Mahakam	
8	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		
	8.1	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		
	9.1	Pembangunan Bandar Udara Long Apung Malinau	DINAS PERHUBUNGAN
	9.2	Pembangunan Bandar Udara Long Bawan Nunukan	
	9.3	Pembangunan Bandar Udara Maratua	
	9.4	Peningkatan Bandar Udara Dajah Dawai	
	9.5	Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	
	9.6	Pekerjaan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau	
	9.7	Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kab. Kutai Timur	
	9.8	Pembangunan Dermaga Sungai	
10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		
	10.1	Pengadaan Marka Jalan	

	10.2	Rambu-Rambu Lalulintas	
	10.3	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	
11	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		DISKOMINFO
	11.1	Pengembangan sarana telekomunikasi	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas 10 “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar” pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 85,95%, dengan capaian hasil pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, melalui kegiatan :
 - Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat KONI Provinsi Kalimantan Timur (pekerjaan Tanah dan Pondasi serta pekerjaan Struktur bawah), Gedung Poltekkes Kaltim Balikpapan (Pekerjaan Pemancangan dan Retaining Wall), Gedung Kantor LVRI (Tahap IV) di Kota Samarinda (Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal lantai 1, Pekerjaan Plafond dan Lantai Lt. 1 serta Pekerjaan Dinding Lt. 2), Perencanaan Gedung Parkir Kantor Gubernur, Perencanaan Gedung Kantor dan Mess Penyandang Disabilitas, dan Perencanaan Gedung Ikatan Alumni Mahasiswa Kaltim.
 - Rehab Gedung Kantor Dinas PU Prov Kaltim dan Rehab Gedung Kantor PKK Prov Kaltim serta Perencanaan Asrama Mahasiswa Kaltim di Surabaya dan Yogyakarta.
2. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan, meliputi kegiatan :
 - Penanganan jalan dan jembatan di Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai. Kedua kecamatan tersebut saat ini

dapat diakses namun dengan kondisi jalan yang masih memerlukan peningkatan.

- Pembangunan Jalan KM. 13 Pelabuhan Kariangau (4,125 KM Rigid Pavement);
- Pembangunan Jalan Rifaddin – Jembatan Mahulu (2,4 KM Rigid Pavement);
- Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (99,02 KM per tanah), fokus penanganan adalah pada segmen 1 (Km.13 Balikpapan - Samboja) dan pada segmen 5 (Km. 13 - Sepingga). Pada tahun 2013, telah terbangun 5 Km jalan tol dengan produk perkerasan rigid dan badan jalan sepanjang 42,75 Km. Pada tahun 2014.
- Pembangunan Jalan Samarinda (TPK Palaran) – Sangasanga (1,5 KM Rigid Pavement);
- Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang (8 KM);
- Pembangunan Jembatan Kembar (Mahakam 4) Samarinda belum mendapat persetujuan MYC dari DPRD Prov. Kaltim;
- Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy (0,3 KM Rigid dan 2 KM Tanah), dan *land clearing* serta perbaikan geometrik.
- Pembangunan jalan Outter Ring road Jembatan Mahulu ke Simpang M. Said dan Outter Ring Road Bandara Samarinda Baru,
- Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Pendek (400 M), dengan konstruksi bangunan pelengkung. Sementara untuk bentang panjang akan dibayai melalui Multiyears Contract APBN, saat ini dalam tahap pelelangan.

Melalui Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ini, tingkat kemantapan Jalan Nasional Tahun 2014 mencapai 91,04%, meningkat jika dibandingkan tahun 2013 yang baru mencapai 90,23%. Sementara untuk Jalan Provinsi, Kondisi Mantap tahun 2014 mencapai 849,95 Km atau 52,20%; meningkat dari tahun

2013 yang baru mencapai 791,89 Km atau 50,01%. Akan tetapi pencapaian target tersebut berjalan lambat akibat adanya keterbatasan anggaran yang disebabkan penurunan pendapatan. Sementara itu, jalan dan jembatan dengan daya mampu diatas 10 ton baru mencapai 8,7% atau 91,35 Km di tahun 2014. Selain itu, penanganan ruas jalan non-status guna meningkatkan daya saing investasi Kaltim yang difokuskan pada ruas-ruas yang menghubungkan kawasan industri dengan pusat pertumbuhan dan outlet baru mencapai 47,90 Km atau 34,11% di tahun 2014.

3. Program Pengembangan Perumahan, melalui kegiatan :

- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat di 10 lokasi Kota Samarinda yang pada Tahun 2014 ini mencapai 2.136 meter semenisasi, 2.265 M peningkatan jalan aspal, 189 M drainase lingkungan serta jaringan transmisi dan pompa air bersih untuk 500 KK dengan kapasitas 10 lt/detik.

4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, melalui kegiatan :

- Pembangunan prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku Embung Muru sebesar 15 lt/detik, Bendung Sitiung 10 lt/detik, Bendung Lombok 10 lt/detik, dan Sumur di Kariangau 40 lt/detik. Pembangunan Bendungan Wain di Balikpapan yang memiliki kapasitas hingga 4,2 juta m³ dengan output 262 lt/detik, rehabilitasi Embung Muru (perkuatan tebing dan kolam olak). Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa, Pembangunan pos hidrologi.
- Pembangunan Pipa distribusi Sekerat di Kutai Timur. Pipa Air Baku Sekerat akan memberikan suplai air baku untuk Kawasan Industri Maloy dengan kapasitas 262 lt/detik, dengan pipa distribusi sepanjang 1,2 Km dari 24,2 Km dari intake.
- Penanganan DAS Kritis yakni DAS Mahakam, DAS Kandilo, dan DAS Sangatta.

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dimana pengembangan Kinerja Air minum melampaui dari target 38% menjadi 50% dikarenakan banyaknya investasi dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR dan PDAM. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah berupa Sarana pengolahan air limbah dan TPA sebagai kebutuhan dasar kehidupan masyarakat yaitu Pembangunan IPAL di Loktuan Bontang, dan IPLT di Samarinda dan Sangatta.
 - Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum berupa Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) yaitu Pembangunan Unit Produksi/Distribusi Lokasi Kawasan Industri Kariangau di Kota Balikpapan; Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum Lokasi Bendang Raya-Ring Road II Kota Samarinda; Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Interkoneksi Loktuan dan Bontang Kota di Kota Bontang; IPA 100 lt/dt di Kabupaten Kutai Barat dan Pembangunan Unit Produksi/Distribusi (2x200 lt/dt) Kawasan Industri Maloy di Kabupaten Kutai Timur.
 - Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yakni pengadaan dan pemasangan pipa diameter 150-50 mm di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara sepanjang 12.985 meter.
6. Program Pengendalian Banjir, melalui kegiatan :
- Pembangunan Pengendali Banjir Kota Samarinda seluas 450 Ha pada 4 sistem, yakni Sistem Karang Asam Kecil dan Karang Asam Besar (normalisasi sungai dan saluran drainase), Karang Mumus (perkuatan tebing, normalisasi sungai dan saluran drainase), serta Loa Janan dan Rapak Dalam (kolam retensi, normalisasi sungai dan sodetan sungai).
 - Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir berupa bangunan pengendali banjir (Landscape Bendali H.M Ardan) dan Normalisasi Sungai Sistem Karang Asam Kecil.

- Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir berupa saluran drainase Jalan Ilham Maulana Sangatta, Bangunan saluran drainase Jalan Ery Suparjan Sangatta, Rehabilitasi dan normalisasi sub sistem Jalan AW. Syahrani sampai Jalan PM. Noor Sempaja (bangunan pengendali banjir dan normalisasi sungai.)
 - Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai berupa Bangunan pengaman pantai pejala, Bangunan pengamanan Pantai Tanjung Tengah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bangunan pengamanan Pantai Manggar Kota Balikpapan, Bangunan pembangunan pantai Pulau Sambit Kabupaten Berau, Bangunan pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang.
7. Program Peningkatan Pelayanan Publik, melalui kegiatan :
- Pembangunan Convention Hall di Kota Samarinda, pada tahun 2014 meliputi penyelesaian pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal , Landscape, Parkir, Interior dan Mebeulair.
 - Pembangunan Pasar Tradisional di Kota Samarinda, pada Tahun 2014 item pekerjaan yang dikerjakan meliputi pekerjaan Tanah dan Pondasi serta Pekerjaan Turap.
 - Penataan Taman Tepian Mahakam di Kota Samarinda meliputi pekerjaan Taman dan Pengecoran Landscape dengan menggunakan *Pattern Concrete*.
8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, melalui kegiatan :
- Pemeliharaan Jalan di kota Samarinda
 - Pemeliharaan Jalan Harun Nafsi - H.M.Rifaddin
 - Pemeliharaan Jalan P.Suryanata - patung Lembuswana Samarinda
 - Pemeliharaan Jembatan (tersebar se-Kaltim)
 - Rehabilitasi Jalan Balikpapan – Samboja
 - Rehabilitasi Jalan Tanah Grogot – Pondong
 - Rehabilitasi Jalan Suryanata

- Rehabilitasi Jalan Simpang Samboja - Simpang Muara Jawa
 - Pemeliharaan Jalan Simpang Bentuas - Simpang Muara Jawa
 - Pemeliharaan Jalan Simpang 3 Sambera - Muara Badak
 - Pemeliharaan Jalan Barong Tongkok – Melak
 - Pemeliharaan Jalan Sp. Barong Tongkok - Simpang 3 Damai
 - Pemeliharaan Jalan Km 5,5 Balikpapan – Kariangau
 - Pemeliharaan Jalan Tanjung Redeb - Talisayan
9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, berupa Rehabilitasi Sedang/Berat Mesjid Al-Ma'ruf Samarinda yang telah diresmikan pada tanggal 5 Februari 2015; Rehabilitasi Mesjid Kejati Samarinda yang telah diresmikan pada tanggal 12 Maret 2015; Pembangunan Gedung Christian Center serta Pembangunan Sarana Ibadah lainnya yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur.
10. Program Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh melalui kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur dasar pemukiman dimana pada Tahun 2014 telah mencapai 6.378 meter jalan lingkungan (semenisasi), 145 meter perkerasan jalan dan 1.198 meter drainase lingkungan.
11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, meliputi kegiatan :
- Pembangunan Bandara Samarinda Baru dengan pola kontrak tahun jamak 2014 - 2018. Target pekerjaan adalah Runway sepanjang 2.250 meter. Progress saat ini telah terbangun jalan akses peralatan dari sisi darat ke sisi udara sepanjang 687 meter, pembangunan GSE (Ground System Equipment) Road sepanjang 737,50 meter. Untuk bangunan sisi udara lainnya, yakni Apron dan Taxiway akan didanai oleh APBN.
 - Pelabuhan laut Maloy sisi darat meliputi gedung kantor pengelola serta bangunan penunjang lainnya (Gedung Workshop, pembangunan gedung kantor pengelola, masjid,

Gedung PMK, pos jaga dan jalan akses lingkungan), dan pembangunan causeway sepanjang 200 meter. Pelabuhan sisi laut akan dibangun dengan dana APBN.

- Pembangunan Bandara Maratua di kabupaten Berau dibangun guna mendukung sektor pariwisata Kaltim serta menjaga kedaulatan NKRI khususnya di pulau-pulau kecil terluar di Kepulauan Derawan. Tahun 2015 Bandara Maratua ditargetkan tuntas dengan konstruksi *Asphalt Treated Base* (ATB) tebal 7,5 m sepanjang 1.400 x 35 meter.
- Pembangunan runway Bandara Datah Dawai sepanjang 1.600 x 30 m, pembangunan 2 Bandara Perbatasan di Kalimantan Utara yakni Bandara Long Bawan di Nunukan sepanjang 1.600 x 30 meter dan Bandara Long Apung Malinau sepanjang 1.200 x 30 meter.
- Angkutan sungai dan subsidi angkutan perintis di 5 kecamatan, yakni Long Bagun, Long Pahangai, Tering, Busang, dan Muara Muntai.
- Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau pekerjaan lanjutan pembangunan kantor Kaltim Kariangau Terminal (KKT).
- Pembangunan Dermaga Sungai pekerjaan lanjutan konstruksi dermaga dan trestle.

12. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, melalui kegiatan :

- Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pada ruas jalan Provinsi Handil II – Muara Jawa dan Balikpapan sepanjang 12.400 m’
- Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan Samarinda – Sei Mariam Kabupaten Kutai Kartanegara ; Samarinda Seberang – Sanga-sanga (Kabupaten Kutai Kartanegara) sebanyak 546 buah.

- Pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Samarinda Sanga-sanga; Muara Jawa dan Balikpapan sepanjang 294 m'.

Program terkait peningkatan sarana dan prasaranan perhubungan telah menyebabkan terjadi peningkatan kuantitas aliran barang sebesar 83 ribu ton dan kuantitas arus penumpang sebesar 633 ribu orang di tahun 2014. Pertumbuhan arus bongkar muat di Terminal Peti Kemas Kariangau terjadi cukup pesat, arus bongkar muat mencapai 183.899 TEUs, meningkat 19% dari tahun 2013.

13. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, melalui kegiatan :

- Pengembangan Sarana Telekomunikasi, berupa menara telekomunikasi di daerah-daerah yang belum terjangkau akses informasi (*blank spot*) dimana pihak swasta secara komersil tidak menjangkau kebutuhan tersebut antara lain; diwilayah perbatasan dan pedalaman 1 menara Kabupaten Mahakam Hulu (Desa Long Lunuq Baru), 1 menara Kabupaten Paser (Muara Telake), 1 menara Kabupaten Kutai Timur (Maloy). Provider yang telah memasang/memanfaatkan menara tersebut adalah PT. Telkomsel.

3.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam 4 (Jembatan Kembar) Samarinda (1,6 KM Fly Over) menghadapi kendala keterlambatan pelaksanaan karena menunggu persetujuan MYC dari DPRD Prov. Kaltim, dan menunggu penyelesaian pembebasan lahan untuk jalan pendekatnya.
2. Target Penanganan Banjir Kota Samarinda tahun 2014 belum tercapai karena pelaksanaan pembangunan

terkendala oleh belum tuntasnya proses penyelesaian pembebasan lahan.

3. Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Maloy masih menghadapi kendala persetujuan AMDAL yang belum terbit dari Kementerian Lingkungan Hidup akibat belum disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) menjadi Peraturan Daerah.
4. Pelaksanaan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena adanya lelang ulang.
5. Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi masih menghadapi permasalahan :
 - Belum optimalnya penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan terkait dengan muatan sumbu terberat (MST) yang tidak sebanding daya mampu jalan.
 - Belum optimalnya konektivitas “jaringan transportasi” di pusat-pusat pelayanan wilayah (intra-regional) dan jaringan penghubung antar pusat pelayanan (inter-regional).
 - Kualitas dan kuantitas infrastruktur masih rendah.
 - Penyelesaian masalah sosial dalam pembebasan lahan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur berjalan lambat.
 - Daya dukung dan kapasitas jalan dan prasarana transportasi lainnya untuk mobilisasi dan distribusi barang dan jasa yang tersedia belum sesuai kebutuhan karena terbatasnya sumber pembiayaan sumberdana APBD dan APBN untuk membangun jalan dan prasarana transportasi yang memiliki daya mampu jalan di atas 10 Ton.

- Belum optimalnya peran provinsi dan kabupaten/kota karena kewenangan Bandara pengumpan dan pengumpul masih menjadi kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. Di samping itu, Pembentukan Otoritas Bandara kenyataannya melemahkan peran dan fungsi Bidang Perhubungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin masih menghadapi kendala keterlambatan dalam proses identifikasi dan verifikasi data calon penerima bantuan (Rumah Tangga Sasaran) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat. Di samping itu, lokasi sasaran Rumah Layak Huni bersifat sporadis atau bersifat menyebar sehingga memperlambat proses mobilisasi material pembangunan rumah.

b. Solusi

1. Meningkatkan kerjasama dengan TNI dalam pembangunan infrastruktur pada lokasi yang memiliki kondisi geografis sulit dijangkau, di daerah perbatasan dan pedalaman melalui swakelola.
2. Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur dan meningkatkan sistem pengawasan pemanfaatan infrastruktur.
3. Peningkatan survei investigasi terkait pengawasan lalu lintas, pengawasan jalan, pengawasan pembangunan infrastruktur, dan perencanaan pembangunan infrastruktur.
4. Peningkatan daya mampu jalan diatas 10 ton dan kapasitas pelayanan bandara dan pelabuhan untuk mobilisasi dan distribusi barang dan jasa.

5. Mengoptimalkan sumber – sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui kerjasama dengan pihak swasta dan CSR.
6. Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar merevisi UU 23 Tahun 2014 tentang kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan meninjau kembali kewenangan otoritas bandara dengan melibatkan fungsi Dinas Perhubungan Daerah.
7. Percepatan pembebasan lahan oleh panitia pembebasan tanah (P2T) di Kabupaten/Kota untuk pembangunan infrastruktur.

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik

Misi keempat Kalimantan Timur Maju 2018 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik, yang dijabarkan dalam satu tujuan dan tiga sasaran. Satu tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan tiga sasaran yaitu (1) Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, (3) Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja.

Capaian sasaran pembangunan di misi keempat sebagian besar menunjukkan hasil yang menggembirakan, kecuali opini BPK yang mengalami penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2013 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2014. Sementara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 4,9 melampaui target 5,2.

Selanjutnya juga terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 70 menjadi 72,16.

Akuntabilitas kinerja Provinsi mendapatkan nilai B+ kategori tinggi (berdasarkan evaluasi Kementerian PAN dan RB RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)). Pemerintah Provinsi bertekad akan tetap meningkatkan kinerja melalui peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja.

Tabel 4.14.
Capaian Sasaran Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Persepsi Korupsi	5,2	4,9	Tercapai (On Track)	
2.	Opini BPK	WTP	WDP	Tidak Tercapai (Off Track)	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	70 (baik)	72,16 (baik)	Tercapai (achieve)	
4.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	72 (B+)	70,97 (B+)	Akan Tercapai (On Track)	
5.	Kinerja Pemerintahan Daerah	Tinggi	Tinggi	Tercapai (achieve)	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik diupayakan melalui pencapaian Prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

4.1. Prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

4.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 11: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan adalah melalui pelaksanaan 17 program

dan 34 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 37,61 Milyar.

Tabel 4.15.
Program Kegiatan Prioritas terkait Reformasi Birokrasi dan Tata
Kelola Pemerintahan

Prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	1.1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	
	1.2	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	
	1.3	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	
	1.4	Ujian Dinas	
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		BIRO KEUANGAN
	2.1	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	
3	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota		
	3.1	Pembinaan dan Fasilitas APBD Kabupaten/ Kota	
4	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja		BIRO ORGANISASI
	4.1	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
	4.2	Binwas Pengembangan dan Penerapan SAKIP	
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	5.1	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
6	Program Penataan Organisasi		
	6.1	Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi	

7	Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik		
	7.1	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	
8	Program Penataan Pendayagunaan Aparatur		
	8.1	Penataan Pendayagunaan Aparatur	
9	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		INSPEKTORAT
	9.1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
	9.2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	
10	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
	10.1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	
	10.2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	
	10.3	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	
	10.4	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	
11	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		
	11.1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	
12	Program Penataan dan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah		BIRO PEMERINTAHAN UMUM
	12.1	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
13	Program Pendidikan Politik Masyarakat		KESBANGPOL
	13.1	Penyuluhan Kepada Masyarakat	
	13.2	Penyusunan Data base Parpol, Orpol, Ormas, LSM, dan Lembaga Adat	
	13.3	Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia	

	13.4	Fasilitasi/Penelitian/Verifikasi Berkas bantuan Parpol, Orpol, Ormas, LSM, dan Lembaga Adat	KESBANGPOL
14	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
	14.1	Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila	
	14.2	Fasilitasi Dan Sosialisasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	
15	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
	15.1	Pembauran Bagi Generasi Muda, Pelajar dan Pramuka	
16	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(Pekat)		
	16.1	Deteksi Dini / Kewaspadaan Dini	
	16.2	Sosialisasi/ Diseminasi/ Peraturan Perundangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya	
	16.3	Monitoring, Analisa, Dan Sinkronisasi Laporan Penanganan Konflik	
	16.4	Pengembangan Kapasitas kemampuan intelegin, aparat kesbangpol dan kominda	
17	Program Pengembangan Data/Informasi		BAPPEDA
	17.1	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	
	17.2	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	
	17.3	Sistem Informasi dan Updating Data	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian target Prioritas 11; Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2014 rata-rata mencapai 85,53%.

Capaian pelaksanaan pembangunan di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan:

1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur, meliputi kegiatan :

- Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, dimaksudkan untuk penempatan pegawai yang sesuai kompetensinya terutama dalam pengisian pejabat struktural dan pejabat fungsional, Prosentase pegawai yang menempati jabatan sesuai kompetensi pada tahun 2014 tergolong dengan kategori nilai “baik” (rata-rata prosentase sebesar 71,23%). Akan tetapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih kekurangan tenaga fungsional tertentu.
- Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai mencapai angka kategori nilai “sangat baik” (rata-rata prosentase sebesar 103,94%), dengan jumlah pengangkatan CPNS sebanyak 161 formasi, tidak mencapai target 179 formasi. Pada Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) untuk seleksi penerimaan CPNSD secara transparan.
- Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi sebagai stimulus untuk peningkatan kinerja aparatur sebanyak 425 orang dalam bentuk pemberian Satya Lencana Karya Satya, kenaikan gaji berkala untuk 331 orang, pemberian TASPEN untuk 17 orang.
- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas berupa beasiswa pendidikan untuk PNS dari S1 sampai dengan S3 sebanyak 144 PNS.
- Ujian Dinas kepada PNS yang akan meningkatkan pangkat golongannya sebanyak 51 orang.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi kegiatan :

- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan berupa pengembangan sistem administrasi keuangan, melakukan pengujian di akhir tahun 2014 bersama Inspektorat Provinsi atas

pelaksanaan Kegiatan fisik pada masing-masing SKPD, membuat peraturan tentang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan Surat Edaran Nomor: 900/185/024-IV/Keu tentang Pengelolaan Persediaan dan membuat Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 serta pendampingan oleh Tim BPKP Perwakilan Kalimantan Timur untuk Persediaan dan Piutang.

- Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupa pengembangan sistem aplikasi Simda BMD untuk mengakomodir kebijakan kapitalisasi aset dan Implementasi aset di beberapa SKPD (Simda Barang) secara online.

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, melalui kegiatan :

- Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk meningkatkan pencapaian jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kegiatan meliputi evaluasi APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerahnya, Evaluasi Perimbangan dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota. Jumlah Kabupaten/Kota yang berhasil memperoleh Opini WTP di tahun 2014 sebanyak 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser dan Kota Balikpapan.

4. Program Peningkatan Pelayanan Publik, melalui kegiatan :

- Penerapan Standar Pelayanan Minimal berupa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Indikator SPM yang diterapkan oleh SKPD Provinsi.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM di Kabupaten/Kota.
- Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM pada 9 SKPD Pengampu SPM Provinsi.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, melalui kegiatan :
 - Bimtek Penerapan Akuntansi berbasis akrual untuk pengelola keuangan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Balikpapan.
 - Evaluasi terhadap APBD Kabupaten/Kota tentang tersedianya anggaran untuk pembuatan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur Akuntansi berbasis Akrual.
6. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja, melalui kegiatan :
 - Asistensi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Bimbingan Teknis penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se- Kalimantan Timur.
 - pembinaan pengawasan pengembangan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur.
 - Fasilitasi evaluasi akuntabilitas kinerja, pengisian data aplikasi monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja oleh Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan tersebut telah yang menghasilkan 10 SKPD Provinsi mendapat predikat Akuntabilitas Kinerja Baik yaitu Disperindagkop, Inspektorat, RSUD Kanujoso Balikpapan, Badan Arsip, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Peternakan, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, RSJD Atma Husada dan 6 Kabupaten/Kota mendapat predikat Akuntabilitas Kinerja Baik yaitu Kota Bontang, Kota Balikpapan,

Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat.

7. Program Penataan Organisasi, melalui kegiatan :
 - Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi berupa penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) SKPD, Lembaga Teknis, Rumah Sakit dan PPK BLUD, Lembaga lain perangkat Daerah, serta pengembangan pengelolaan Sistem Informasi SKPD.
8. Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, melalui kegiatan :
 - Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik berupa sosialisasi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
9. Program Penataan Pendayagunaan Aparatur, melalui kegiatan :
 - Penataan Pendayagunaan Aparatur berupa pengembangan Analisa Jabatan dan Anggaran Berbasis Kinerja.
10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, melalui kegiatan :
 - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala berupa pemeriksaan dan review laporan keuangan SKPD Provinsi, Pemeriksaan khusus/tertentu limpahan instansi terkait dan Kabupaten/Kota, Pemeriksaan kegiatan pembangunan Infrastruktur/Pemtak/Audit Probity, Evaluasi LAKIP SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota dan Audit Dana BOS.
 - Penanganan kasus pengaduan sebanyak 20 kasus dan pembentukan unit pengaduan masyarakat sebanyak 3 unit.
 - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan berupa penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan mencapai 80%.
 - Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di 42 SKPD.

11. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan, melalui kegiatan :

- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan sebanyak 65 orang.
- Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja bagi tenaga pengawas sebanyak 35 orang.

12. Program Penataan dan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah, ditujukan untuk peningkatan kinerja pemerintahan daerah, melalui kegiatan :

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berupa Pembinaan kepada SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan LPPD.
- Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013.
- Verifikasi dan validasi data LPPD Provinsi Kaltim Tahun 2013 oleh Tim teknis LPPD dari Tim nasional.
- Melakukan penilaian SKPD terbaik dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013.
- Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota pada 9 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Hasil evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk Provinsi memperoleh peringkat 7 dengan skor 2,6718 (tinggi). Adapun hasil evaluasi LPPD terhadap Kota se-Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda memperoleh peringkat 6 dengan skor 3,2332 (sangat tinggi), Kota Balikpapan memperoleh peringkat 11 dengan skor 3,0872 (sangat tinggi), Kota Bontang memperoleh peringkat 12 dengan skor 3,0829 (sangat tinggi), Sedangkan hasil evaluasi LPPD terhadap Kabupaten se-Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh peringkat 10 dengan skor 3,2289 (sangat tinggi) dan Kabupaten Berau memperoleh peringkat 26 dengan skor 3,0936 (sangat tinggi).

13. Program Pendidikan Politik Masyarakat, melalui kegiatan :

- Penyuluhan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, ormas 100 orang, Sosialisasi pendidikan politik bagi mahasiswa 100 orang.
- Penyusunan Data base Parpol, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga Adat, Bimbingan Teknis Database ormas 65 orang, Sosialisasi perundang-undangan bagi parpol dan Ormas 100 orang.
- Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, berupa Sosialisasi Indeks demokrasi Indonesia bagi aparatur sebanyak 70 orang.
- Fasilitasi/Penelitian/Verifikasi Berkas bantuan Ormas, LSM, OKP dan Organisasi lainnya, sebanyak 80 ormas dan LSM.

14. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan :

- Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui sosialisasi kepada 100 orang.
- Fasilitasi Dan Sosialisasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di 10 Kabupaten/Kota.

15. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan:

- Pembauran Bagi Generasi Muda, Pelajar dan Pramuka melalui sosialisasi kepada 100 orang.

16. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), melalui kegiatan :

- Deteksi Dini / Kewaspadaan Dini kepada 100 orang.
- Sosialisasi/Diseminasi/Peraturan Perundangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya kepada 100 orang.
- Monitoring, Analisa dan Sinkronisasi Laporan Penanganan Konflik se-Kalimantan Timur.
- Pengembangan kapasitas kemampuan intelejen, aparat kesbangpol dan kominda berupa pelatihan aparat sebanyak 50 orang.
- Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan, kepada 100 orang.

17. Program Pengembangan Data/Informasi, melalui kegiatan :

- Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan, berupa; Kaltim Dalam Angka; Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting; Statistik Sektoral; PDRB; Laporan Triwulanan Kinerja Perekonomian; Data Base Pembangunan; Indeks Kinerja.
- Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan untuk dokumen Perubahan APBD, KUA PPAS, APBD tahun mendatang, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), dokumen usulan Program Kegiatan Kementerian/Lembaga.

4.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur yang berfluktuatif dengan tendensi menurun.
2. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur masih menghadapi beberapa kendala antara lain :
 - Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai oleh Kepala BKN.
 - Belum Optimalnya pengawasan terhadap Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013.
 - Belum adanya penetapan dalam bentuk SK khususnya untuk jabatan fungsional umum (JFU) sehingga penjabaran tugas dan target dalam menyusun SKP belum bisa tertuang dalam tupoksi.
 - Kurangnya pemahaman PNS dalam sistematika penyusunan SKP.
 - Kebijakan rekrutmen CPNS dari kementerian PAN dan RB ternyata menghadapi masalah antara lain; Kuota persetujuan formasi sangat terbatas sehingga tidak sesuai dengan

kebutuhan riil daerah; tidak adanya prioritas kelulusan untuk tenaga honorer pada seleksi CPNS; Adanya formasi yang tidak ada peminatnya; tidak adanya pertimbangan prioritas kelulusan pada seleksi CPNS untuk putra daerah yang telah mengabdikan di daerah; adanya NIK yang bisa digunakan orang lain untuk mendaftar di portal PANSELNAS sehingga merugikan pemilik NIK asli karena untuk mendaftar akan tertolak di portal; tidak dapat dilakukan perbaikan data pada saat pendaftaran melalui SSCN; perbedaan penetapan nama jabatan pada Perka BKN nomor 3/2013 dengan E-Formasi (Kementerian PAN); kurangnya pemahaman para pengambil keputusan tentang teknis pelaksanaan seleksi CPNS 2014;

- Pemanfaatan/Penggunaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) belum optimal karena Informasi Kepegawaian yang ditampilkan pada database KPE berbeda dengan data kepegawaian yang ada di SAPK dan Pembuatan KPE cukup lama.
- Penempatan dalam Jabatan Struktural (Eselon II, III dan IV) melalui pengukuran kompetensi (*assessment center*) karena pengukuran kompetensi jabatan belum menjadi acuan untuk menentukan penempatan PNS dalam jabatan struktural, beberapa pejabat telah menduduki jabatan sebelum dilakukan pengukuran kompetensi; belum tersedianya instrumen maupun fasilitas untuk melakukan *assessment center*. Disamping itu, penempatan dalam jabatan fungsional belum optimal karena belum ditetapkannya PP tentang pengangkatan jabatan administrasi, fungsional, pimpinan tinggi dan PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- Penegakan Disiplin dan Peningkatan Kinerja PNS belum berjalan sesuai ketentuan karena kurangnya pemahaman disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

3. Pengelolaan Keuangan belum mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK karena adanya salah penyajian persediaan pada beberapa SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pencatatan Aset Tetap berupa Tanah yang bermasalah dan penyajian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bermasalah. Disamping itu pula terdapat pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dalam standar akuntansi pemerintah serta peraturan dan ketentuan yang ada.
4. Penyampaian LAKIP oleh sebagian besar SKPD sering terlambat karena kurangnya komitmen, Penetapan Kinerja (PK) belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan, dan belum adanya software tentang sistem pengumpulan data kinerja yang memadai dan terpadu dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Hal tersebut juga menyebabkan keterlambatan penyampaian LPPD.
5. Pengukuran Kinerja masih menghadapi permasalahan pada kurangnya pemahaman SKPD dalam menyusun indikator kinerja dimana pengukurannya sering kali bias dan kurang jelas tolak ukurnya (uncontrollable) dan IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, dan Evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti sebagai alat perbaikan penerapan manajemen kinerja dan mengukur keberhasilan unit kerja.
6. Pelayanan Publik masih menghadapi permasalahan pada SPM dimana beberapa SPM belum lengkap petunjuk teknis maupun pedoman perencanaan pembiayaan SPM dan daerah belum bisa menyusun perhitungan perhitungan pembiayaan SPM dgn baik, definisi operasional indikator SPM yang diartikan berbeda dan tidak seragam. Sementara itu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memerlukan penataan ulang dengan berlakunya UU No. 23 tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.

120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 pada angka 4 yaitu penataan/perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 tahun 2014.

7. Belum terintegrasi beberapa Aplikasi perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan saat ini, seperti aplikasi SIPPD-SIMDA-SIMONTEPPA yang disebabkan basis data dan aplikasi dibangun menggunakan platform yang berbeda, tertutup dan kadang tidak menggunakan Relational Data Base Management System (RDBMS) sehingga sulit untuk diintegrasikan.

b. Solusi

1. Perbaikan di banyak indikator dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur.
2. Meningkatkan pengukuran kompetensi Aparatur melalui Metode Assesment Center yang diperuntukkan bagi pejabat eselon II. Metode Quasi Assesment Program (QAP), yang diperuntukkan bagi pejabat struktural eselon III. Metode tes Psikologi dan FGD (Focus Group Discussion), yang diperuntukkan bagi pejabat struktural eselon IV dan JFU/JFT.
3. Pengembangan sistem administrasi kepegawaian.
4. Dalam rangka untuk mencapai target opini BPK berupa WTP atas Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, diperlukan perbaikan penatausahaan/inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas aset yang dikuasai oleh Pihak Ketiga.
5. Peningkatan kapasitas Aparatur dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis Kinerja dan peningkatan kemampuan menyusun indikator kinerja yang SMART.



6. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Meningkatkan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan terus melakukan pembinaan/pengawasan serta meningkatkan kegiatan sosialisasi atas semua kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi baik secara langsung maupun melalui media massa/website.
8. Meningkatkan sistem pengembangan data base pencapaian kinerja di setiap SKPD.
9. Peningkatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik kepada masyarakat.
10. Segera membangun Project Interoperabilitas SIM Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk integrasi sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran.
11. Perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan melalui kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penancangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan rencana aksi daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.
12. Meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Misi 5 : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim

Misi kelima ini dijabarkan dalam satu tujuan dan dua sasaran. Tujuan tersebut adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan dua sasaran diantaranya adalah (1) Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan, (2) Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca.

Capaian sasaran misi 5 pada tahun 2014 kurang menggembirakan. Pola pembangunan ekstratif terhadap sumber daya alam telah menyebabkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan serta tingginya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Tercatat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Timur terhitung pada nilai 75,24 tidak mencapai target 78,29. Permasalahan utama rendahnya indeks kualitas lingkungan tersebut adalah karena disebabkan oleh rendahnya tutupan lahan akibat pembukaan lahan sebagai manifestasi dari penerbitan ijin kegiatan pertambangan dan perkebunan sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air baku menjadi menurun.

Tabel 4.16.
Capaian Sasaran Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan	78,29	75,24	Tidak Tercapai (Off Track)	
2.	Intensitas Emisi	1.517(dari BLH)	1.611	Tidak Tercapai (Off Track)	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

Disisi lain laju deforestasi (*41.817 ha/tahun*) yang lebih tinggi dari kemampuan kita untuk melakukan rehabilitasi lahan menyebabkan Kalimantan Timur merupakan provinsi penyumbang emisi gas rumah kaca ke 4 terbesar dari 34 provinsi di Indonesia dengan rata rata 52,8 juta ton CO₂eq/tahun. Sebesar 73 % emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di Kalimantan Timur adalah berasal dari perubahan hutan dan lahan untuk pemanfaatan yang lain. Saat ini elastisitas emisi Kalimantan Timur mencapai 1.611 Ton CO₂eq/Juta \$ PDRB dan belum mencapai target untuk penurunan intensitas emisi sebesar 1.517 Ton CO₂eq/Juta \$ PDRB yang ditetapkan pada tahun 2014.

Permasalahan yang ditimbulkan akibat alih fungsi lahan (di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan) tersebut tidak bisa terlepas dari tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola sistem perijinan tidak transparan dan akuntabel serta tumpang tindih lahan. Sementara yang dirasakan masyarakat secara langsung adalah kejadian banjir dikala hujan dan sulitnya mendapatkan air di kala musim kemarau.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan kerangka kerja yang dituangkan dalam RPJMD 2013-2018 untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang telah di implementasikan dengan berbagai program dan kegiatan. Strategi Pembangunan Kalimantan Timur yang berkelanjutan dan Ramah Lingkungan telah dibuat dan telah mewarnai kebijakan dan arah pembangunan daerah, demikian pula strategi dan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca telah dihasilkan dan dilaksanakan, dimana strategi pembangunan tersebut memastikan pembangunan ekonomi dan pengurangan emisi dikuatkan dan dilaksanakan secara bersama. Bagi Kalimantan Timur yang sedang membangun, strategi yang dipilih adalah menciptakan dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tambah tinggi namun disisi lain menghasilkan emisi yang rendah.

Dalam rangka mendukung penurunan intensitas emisi Pada tahun 2014 telah dilakukan berbagai upaya antara lain :

- Melalui penerbitan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Dalam rangka penataan Penguatan pelaksanaan moratorium penerbitan izin tambang dan lahan gambut melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur tentang Penundaan ijin pertambangan;
- Program penanaman satu milyar pohon sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 ini sebanyak 193.813.322 pohon;
- Program penanaman, reklamasi, dan rehabilitasi DAS prioritas sebanyak 2.728.105 pohon seluas 11.160 ha.

Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Serta Berprespektif Perubahan Iklim diupayakan melalui pencapaian Prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

5.1. Prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

5.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup adalah melalui pelaksanaan 9 program dan 21 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16,23 Miliar. Sasaran prioritas ini meliputi: Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan; Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 4.17.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Prioritas 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			
No		Program / Kegiatan	SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
	1.1	Program Langit Biru	
	1.2	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	
	1.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	
	1.4	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	
	1.5	Penaatan Dan Penegakan Hukum Lingkungan	
	1.6	Rakor Regional Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	1.7	Laboratorium Lingkungan	
	1.8	Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	

	1.9	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		
	2.1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	
3	Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		
	3.1	Pengelolaan Dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk	
4	Program Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut Dan Hutan		
	4.1	Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Dikawasan Konservasi	
5	Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup		
	5.1	Pengelolaan Habitat Gajah Dan Orang Utan	
	5.2	Perlindungan Dan Pengelolaan Kawasan Konservasi SDA Dan Kawasan Karst	
6	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		
	6.1	Pelaksanaan Penilaian Proper dan Pengawasan Kegiatan Usaha dan Jasa	
7	Program Perencanaan Tata Ruang		DPU
	7.1	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	
	7.2	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	
	7.3	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	
	7.4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	

8	Program Pemanfaatan Ruang	
	8.1	Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	9.1	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018,dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian target prioritas 12 "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 91,72%. Adapun capaian hasil pembangunan Prioritas "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup", adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan :
 - Program Langit Biru berupa Pengukuran kualitas udara Ambien dengan target 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur dan tercapai hanya 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. Pengukuran dilaksanakan 2 (dua) tahap dan masing-masing 2 (dua) titik lokasi yaitu daerah pemukiman dan kawasan padat lalu lintas.
 - Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih dilaksanakan dengan melakukan survey inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air di Sungai dengan target 1 (satu) sungai . Sumber pencemaran di DAS Mahakam sudah diidentifikasi dan diinventarisir, sumber pencemaran dari kegiatan usaha/industry dan domestic sudah dipetakan dengan focus 3 (tiga) Sub DAS

(Karang Mumus, Tenggarong dan BOH). Hasil perhitungan sejauh ini menunjukkan bahwa beban pencemaran di DAS Mahakam untuk BOD dan TSS dari sumber domestic adalah 340.000 kg/hari dan 105.000 kg/hari.

- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura dengan target 4 (empat) kabupaten/Kota yg meraih ikut Nominasi adipura dan tercapai 4 (empat) kabupaten/kota menjadi nominasi ADIPURA, dengan mendapatkan nilai dalam skala baik yaitu 71 s/d 80 karena memiliki pasar yang representatif dan mengoperasikan TPA dengan metode Control Landfill atau sanitary Landfill.
2. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam, melalui kegiatan :
 - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim berupa Rapat Koordinasi dan inventarisasi Potensi Gas Rumah Kaca.
 3. Program peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan :
 - Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pelatihan Adiwiyata dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM (sumber daya manusia) sejak dini untuk peduli dan berbudaya lingkungan, di 259 sekolah dari SD sampai dengan SMA.
 4. Program pengembangan kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan :
 - Penyusunan Perda PPLH, Perda Pengendalian Pencemaran Udara, Perda Pengelolaan Limbah B3, Revitalisasi AMDAL dan KLHS berupa penyusunan perda yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
 5. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2014 mencapai skor 71.57 (61,17) dari target 64,33 (67,83) pada kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang. Sementara pada kinerja pengawasan penataan ruang telah terealisasi 34% dari target 20%, serta kinerja penyelenggaraan penataan ruang baik

dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian mencapai 61,17 dari target skor 67,83. Permasalahan utama tidak tercapainya target tersebut salah satunya dikarenakan proses penetapan RTRWP Kalimantan Timur belum sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan:

- Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang berupa rapat-rapat BKPRD dalam rangka penyempurnaan RTRWP maupun RTRWK.
- Sosialisasi dan pelatihan bidang penataan ruang yang intensif dengan target group pemerintah, legislatif dan masyarakat di level provinsi dan kabupaten/kota.
- Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat
- Pengembangan dan updating Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU)
- Penyebarluasan informasi dan kampanye publik bidang penataan ruang
- Peningkatan peranserta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
- Penyempurnaan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
- Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kriteria pengendalian pemanfaatan ruang
- Penyusunan program pemanfaatan ruang wilayah provinsi sesuai indikasi program utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- Penyiapan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang, penambahan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pembangunan aplikasi monitoring penyelenggaraan penataan ruang berbasis IT.

5.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan masih belum dilakukan pada seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur, disebabkan kurangnya informasi keberadaan perusahaan tambang yang operasional.
2. Belum semua kabupaten/kota mempunyai data lengkap terkait dengan penilaian ADIPURA.
5. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup menghabiskan waktu yang sangat panjang.
6. Masih minimnya data dan informasi sumber-sumber kegiatan yang berpotensi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca.
7. Proses legislasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berjalan lambat karena belum tuntasnya kesepakatan antara Kementerian Kehutanan dengan Tim Terpadu terkait perubahan fungsi kawasan hutan, dan adanya penyesuaian kembali terkait perubahan batas wilayah akibat pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

b. Solusi

1. Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah kabupaten/kota serta Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Peningkatan pemantauan kualitas udara ambient di kabupaten/kota.

3. Pengembangan Data Base Lingkungan.
4. mengembangkan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi melalui Bank sampah dan 3 R (*Reduce, reuse, recycle*)
5. Peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan di tingkat kabupaten/kota.
6. Pembentukan Kelompok Kerja inventarisasi gas rumah kaca dengan melibatkan SKPD terkait yang berwenang menangani kegiatan-kegiatan yang berpotensi dengan peningkatan gas rumah kaca.
7. Percepatan legislasi Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) menjadi Peraturan Daerah.

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan

1.1. Prioritas 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan

1.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 3; Percepatan Pengentasan Kemiskinan adalah melalui pelaksanaan 3 program dan 3 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,62 Milyar. Sasaran prioritas ini adalah Menurunnya Tingkat Kemiskinan.

Tabel 4.18.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan		
No	Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.1	Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi	
2	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	DINAS KEHUTANAN
2.1	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan	
3	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
3.1	Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir	

Sumber : *RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014*

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian target prioritas 3 "Percepatan Pengentasan Kemiskinan" pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 93,48%. Adapun capaian hasil pembangunan Prioritas "Percepatan Pengentasan Kemiskinan", adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, melalui kegiatan:
 - Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi antara lain jalan akses dan fasilitas umum permukiman transmigrasi.
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, melalui kegiatan :
 - Pembinaan Masyarakat Desa Hutan melalui Pelatihan Sumber Daya Manusia Masyarakat Sekitar Hutan pada 7 desa se-Kalimantan Timur, yaitu; Desa Sabintulung

(Kabupaten Kutai Kartanegara) pada areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Surya Hutani Jaya; Desa Karang Dalam (Kabupaten Kutai Timur) pada areal IUPHHK-HA PT. Kedung Madu Tropical Wood; Desa Gurimbang (Kabupaten Berau) pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Berau Coal; Desa Sepaku (Kabupaten Penajam Paser Utara) pada areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT.ITCI Hutani Manunggal; Desa Dempar (Kabupaten Kutai Barat) pada areal IUPHHK-HA PT. Rimba Karya Rayatama; Desa Mantar (Kabupaten Kutai Barat) pada areal IUPHHK-HA PT. Harapan Kaltim Lestari; Desa Batu Kajang (Kabupaten Paser) pada areal IPPKH PT.Kideco Jaya Agung.

c. Permasalahan

1. Ketersediaan dan kesiapan lahan Transmigrasi belum tersosialisasikan kriteria penyediaan tanah transmigrasi secara optimal Perubahan Paradigma Penyelenggaran belum tersosialisasikan dengan baik sesuai undang-undang No. 29/2009 dan PP No.3/2014 tentang penyelenggaraan transmigrasi.
2. Belum tersedianya Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang memadai sesuai kebijakan sebagaimana yang diamanatkan pada perubahan undang-undang tentang penyelenggaraan transmigrasi.

d. Solusi

1. Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait.

2. Dukungan Regulasi Penyelenggaraan Transmigrasi dalam bentuk Perda tentang pelaksanaan Transmigrasi.
3. Menyiapkan Perencanaan Pembangunan/Pengembangan Wilayah Transmigrasi sesuai Undang Undang No.29/2009 dan Peraturan Pemerintah No.3/2014.

1.2. Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

1.2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan adalah melalui pelaksanaan 3 program dan 8 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15,29 Milyar. Sasaran prioritas ini meliputi; Meningkatnya Pendapatan Perkapita; Menurunnya Indeks Gini; Meningkatnya daya beli masyarakat.

Tabel 4.19.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan			DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI
No	Program / Kegiatan		
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
1.1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk		
1.2	Pengembangan Pasar Lelang Daerah		
1.3	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan		
1.4	Peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP		
1.5	Kontak Dagang		
2	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah		
2.1	Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis sumber daya lokal		
2.2	Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya		
3	Program Penataan Struktur Industri Hulu-Hilir		
3.1	Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-Hilir		

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian target prioritas 5 "Pengembangan Ekonomi Kerakyatan" pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 83,46%. Adapun capaian hasil pembangunan Prioritas " Pengembangan Ekonomi Kerakyatan", adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, melalui kegiatan:
 - Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk sebanyak 2 pasar tradisional untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Barat (Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Tering) dan 1 pasar tradisional di Kota Samarinda, 1 Gudang Raskin di Kabupaten Nunukan, 3 perencanaan pembangunan pasar di Kecamatan Muara Wahau di Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, 40 kegiatan bazaar, 12 laporan dari 4 lokasi pameran.
 - Pengembangan Pasar Lelang Daerah dengan kegiatan pemantauan koneksitas Pasar Lelang komoditi di Jawa Timur, Yogyakarta, Bandung, dan daerah lainnya.
 - Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan sebanyak 1 laporan.
 - Peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP di 10 kabupaten/kota.
 - Kantor Perwakilan Dagang Kalimantan Timur dengan menyewa bangunan 1 unit di Surabaya, Jawa Timur.
2. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah, melalui kegiatan:
 - Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis sumber daya lokal

- Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
 - Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis sumber daya lokal di 3 Kabupaten/Kota dan pelatihan kepada 20 pelaku IKM untuk pengolahan Karet Rumput laut, dan Singkong Gajah.
 - Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya berupa sertifikat merk untuk 25 IKM, sertifikasi halal untuk 50 IKM, Siswa SMK yang dilatih kewirausahaan sebanyak 50 orang.
3. Program Penataan Struktur Industri Hulu-Hilir, melalui kegiatan:
- Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-Hilir :
 - Focus Group Discussion “Penyiapan Rancangan Kerjasama Pengusulan Kawasan Industri menjadi Kawasan Ekonomi Khusus”. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tanggal 17 Oktober Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan memiliki luas 557,34 Ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
 - Seminar Penyusunan Rancangan Pengelola Kawasan, oleh Fahmi Shahab (Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri Indonesia) dan Teguh Riyanto (Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT. Kaltim Industrial Estate Bontang).

1.2.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Pembinaan pengolahan karet di Kutai Barat berupa kegiatan bantuan peralatan produksi sebesar 150 juta rupiah tidak dilaksanakan pengadaannya dan menjadi silva di tahun 2014, hal ini dikarenakan beberapa calon penerima bantuan peralatan yaitu petani karet sudah tidak maksimal lagi dalam mengolah karet disebabkan harga pasaran karet yang berubah-ubah.
- Pelatihan Rumput Laut di Kota Bontang dan Pelatihan Singkong Gajah dilakukan sesuai program.
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam kemampuan membekali diri untuk dapat lebih maju dalam menerapkan pengetahuan terhadap teknologi industri yang semakin maju dan berkembang.

b. Solusi

- Guna mengoptimalkan hasil komoditi karet, perlu dibangun pabrik pengolahan produk berbahan baku karet, sehingga mampu menampung produksi karet yang tidak hanya dari Kutai Barat namun dari beberapa Kota/Kabupaten, sehingga dapat menjadikan nilai tambah bagi hasil komoditi ini.
- Kedepannya kepada SDM IKM agar lebih banyak belajar dengan mengikuti berbagai pelatihan dan studi banding ke IKM yang sudah lebih maju teknologinya, sehingga nantinya SDM IKM dapat meningkatkan kemampuan dalam menumbuhkembangkan usaha yang dijalankannya.

1.3. Prioritas 6 : Transformasi Ekonomi

1.3.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 6 : Transformasi Ekonomi adalah melalui pelaksanaan 10 program dan 15 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29,29 Milyar. Sasaran prioritas ini meliputi: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas; Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah.

Tabel 4.20.
Program Kegiatan Prioritas terkait Transformasi Ekonomi

Prioritas 6 : Transformasi Ekonomi			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial		DISPERINDAGKOP
	1.1	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		
	3.1	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	
3	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional		
	4.1	Koordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan Internasional	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		
	5.1	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	
	5.2	Membangun Jejaring Dengan Eksportir	
	5.3	Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha	
5	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		DISBUN
	6.1	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	
6	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		DISNAK
	8.1	Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	
7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		DISBUDPAR
	8.1	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		

	9.1	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
	9.2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
9	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
	10.1	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
	10.2	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dialam dan Diluar Negeri
10	Program Pengembangan Kemitraan	
	11.1	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018,dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian target prioritas 6 “Transformasi Ekonomi” pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 87,01%. Adapun capaian hasil pembangunan Prioritas “Tranformasi Ekonomi”, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, melalui kegiatan :
 - Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
2. Program Pembentukan Kawasan/Sentra Ekonomi, melalui kegiatan :
 - Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Kariangau sehingga Terwujudnya pembangunan kawasan industri Kariangau.
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, melalui kegiatan :
 - Pengembangan dan pelayanan teknologi industry melalui Pelatihan bagi Indusri Kecil dan Menengah (IKM) berupa pelatihan pengemasan, pembuatan anyaman rotan, dan kerajinan lainnya pada 10 Kab/Kota.

4. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional, meliputi kegiatan :
 - Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dalam rangka menyongsong pemberlakuan MEA 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
 - Rapat pembahasan dan Sidang Sosek Malindo di Jakarta dan Kuala Lumpur merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Sabah, merupakan kegiatan akhir di tahun 2014 untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimana pada tahun-tahun yang akan datang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, meliputi kegiatan :
 - Bimtek SKA kepada Eksportir dan Calon Eksportir sebanyak 100 orang serta koordinasi ke Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur yang membidangi perdagangan untuk penyeragaman kebijakan sebagai IPSKA.
 - Melaksanakan sistem informasi kinerja Eksportir/Importir melalui pengolahan database kinerja eksportir/importir.
 - Penyebaran Booklet Potensi Ekspor Kaltim ke beberapa Negara ITPC/ATDAG.
6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan :
 - Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat berupa Bibit kelapa sawit 97.500 batang, Pupuk NPK 75.000 Kg, Herbisida 3.750 Liter, kawat pengaman 96.000 potong untuk kebun sawit 750 Ha, Bibit Karet 262.500 batang, pupuk NPK 52.500 Kg,

Herbisida 2.625 Liter untuk 525 Ha, Bimtek dan Sosialisasi.

- Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan berupa Pengembangan tanaman padi varietas unggul lokal 240 Ha, Pengembangan tanaman ubi kayu 60 Ha, Pengembangan padi unggul nasional 120 Ha, Pengembangan padi hibrida 670 Ha, Pengembangan sentra produksi padi 50 Kecamatan (Benih Padi 7.000 Ha).
- Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan berupa Pengembangan penangkar benih unggul lokal 80 Ha, Pengembangan penangkar benih unggul nasional 120 Ha, Pengembangan penangkar benih kedelai 20 Ha, Fasilitas lantai jemur 15 Unit.
- Intensifikasi Dan Rehabilitasi Kebun Lada, Karet, Kakao, Kelapa Dalam, Kopi berupa intensifikasi Kebun Lada 50 Ha, intensifikasi Kebun Kakao, intensifikasi Kebun Karet, intensifikasi Kebun Kelapa Dalam 225 Ha, intensifikasi Kebun Kelapa Sawit 300 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara serta pelatihan, pemberian pupuk dan pestisida kepada masyarakat.
- Adapun Pelatihan Intensifikasi Kebun Kakao/ Budidaya Tanaman Kakao yaitu Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Busang Sebanyak 30 Orang / 1 (satu) Kelas terdiri dari pengurus kelompok dan atau anggota kelompok-Kelompok Tani Lalut Sang, Kelompok Tani Sungai Anai dan Kelompok Tani Sumber Rezeki, dimana Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 17 – 18 Oktober 2014. Kabupaten Berau Kecamatan Tabalar Kelompok Tani Perintis sebanyak 25 Orang / 1 (satu) kelas yang dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 28 - 29 Oktober 2014.

- Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis melalui pengembangan kawasan hortikultura buah-buahan seluas 445 Ha; pengembangan kawasan hortikultura tanaman anggrek 5.000 potong; *screen house* anggrek lokal 1 unit; demplot hortikultura dalam *screen house* 1 unit; pemeliharaan kawasan jeruk dan durian/lai seluas 350 Ha.
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, meliputi kegiatan :
- Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Berupa mengikuti pameran di Kaltim Fair 2014, Kaltim Expo 2014, Parade Pangan Nusantara, Agrinex Expo 2014, Agro and Food Expo 2014, Pameran PENAS Malang, Samex Batam, Samex Surabaya, Pameran Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional, Sabah International Expo 2014, Mengikuti Pawai Pembangunan Mobil Hias, Mengikuti Multisector Musiad Expo, International Business Forum dan Promosi Di Istanbul dan Malaysia.
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, melalui kegiatan :
- Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, meliputi kegiatan :
- Objek pariwisata berkualitas dunia yang menjadi destinasi utama Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di Tahun 2014 mencapai 3 objek wisata dari target 6 objek wisata dengan persentase sebesar 50%.
 - Objek wisata yang menjadi destinasi utama wisatawan yaitu Kebudayaan Danau Melintang (*Life of Style*),

Taman Nasional Kutai dengan anggrek hitam dan orang utannya, serta Kepulauan Derawan dan Labuan Cermin Berau.

1.3.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Sistem Pengadaan Barang Jasa belum terlaksana maksimal, proses lelang terlambat.
2. Belum fokusnya pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap dukungan pengembangan kepariwisataan yang baik.
3. Kegiatan pengembangan kebudayaan yang masih melekat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum direncanakan dengan maksimal baik dari program kegiatan maupun dari dukungan pendanaan, hal ini mengingat kementerian pusat berbeda nomenklatur yang dahulu kebudayaan melekat dengan Pariwisata pada saat ini kebudayaan masuk pada pendidikan dan Pemerintah Daerah belum cepat menyikapi ini.
4. Potensi daya saing kepariwisataan sangat besar belum didukung dengan dokumen perencanaan pengembangan oleh kabupaten/kota yang sinkron dengan provinsi.
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat sekitar obyek wisata untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada dengan mandiri.
6. Bantuan peralatan petani karet sudah tidak maksimal lagi dalam mengolah karet disebabkan harga pasaran karet yang berubah-ubah.

7. Masih kurangnya Suber Daya Manusia bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam kemampuan membekali diri untuk dapat lebih maju dalam menerapkan pengetahuan terhadap teknologi industri yang semakin maju dan berkembang.

b. Solusi

1. Penyelarasan terhadap program prioritas pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten / Kota dengan focus pengembangan kepariwisataan yang jelas dan daya saing obyek wisata.
2. Perlu strategi yang baik terhadap peningkatan sumber daya manusia bidang kepariwisataannya agar terkelola maksimal dan mendapatkan nilai imbal balik yang menguntungkan terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Guna mengoptimalkan hasil komoditi karet, perlu dibangun pabrik pengolahan produk berbahan baku karet, sehingga mampu menampung produksi karet yang tidak hanya dari Kutai Barat namun dari beberapa Kota/Kabupaten, sehingga dapat menjadikan nilai tambah bagi hasil komoditi ini.
4. Kedepannya kepada SDM IKM agar lebih banyak belajar dengan mengikuti berbagai pelatihan dan studi banding ke IKM yang sudah lebih maju teknologinya, sehingga nantinya SDM IKM dapat meningkatkan kemampuan dalam menumbuhkembangkan usaha yang dijalankannya.

1.4. Prioritas 7 : Pengembangan Agribisnis

1.4.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 7 : Pengembangan Agribisnis adalah melalui pelaksanaan 4 program dan 4 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19,48 Milyar. Sasaran prioritas ini meliputi: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah.

Tabel 4.21.
Program Kegiatan Prioritas terkait Pengembangan Agribisnis

Prioritas7 : Pengembangan Agribisnis			
No		Program/Kegiatan	SKPD Pelaksana
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan		DINAS PERKEBUNAN
	1.1	Intensifikasi dan Rehabilitasi Kebun Lada, Karet, Kakao, Kelapa dalam dan Kopi	
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		
	2.1	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan	
2	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan		DINAS PETERNAKAN
	2.1	Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018,dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian target prioritas 7 : Pengembangan Agribisnis pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 93,42%. Adapun capaian hasil

pembangunan Prioritas 7 Pengembangan Agribisnis, adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi Dan Rehabilitasi Kebun Lada, Karet, Kakao, Kelapa Dalam, dan Kopi berupa; pupuk NPK 3.000 Kg, Pestisida 150 Paket, Herbisida 750 liter untuk Intensifikasi Kebun Lada 150 Ha ; pupuk NPK 25.000 Kg, Pestisida 125 Paket, Herbisida 625 liter untuk intensifikasi Kebun Kakao 125 Ha; pupuk NPK 110.000 Kg, Pestisida 550 Paket, Herbisida 2.750 liter untuk intensifikasi Kebun Karet 550 Ha; pupuk NPK 25.000 Kg, Pestisida 125 Paket, Herbisida 625 liter untuk intensifikasi Kebun Kelapa Dalam 125 Ha; pupuk NPK 60.000 Kg, Pestisida 300 Paket, Herbisida 1.500 liter intensifikasi Kebun Kelapa Sawit 300 Ha. Adapun Pelatihan Intensifikasi Kebun Kakao/ BudidayaTanaman Kakao yaitu Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Busang Sebanyak 30 Orang/1 (satu) Kelas terdiri dari pengurus kelompok dan atau anggota kelompok Kelompok Tani Lalut Sang, Kelompok Tani Sungai Anai dan Kelompok Tani Sumber Rezeki, dimana Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 17 – 18 Oktober 2014. Kabupaten Berau Kecamatan Tabalar Kelompok Tani Perintis Sebanyak 25 Orang / 1 (satu) kelas yang dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 28 - 29 Oktober 2014.
2. Program Pengembangan Kawasan Peternakan, melalui kegiatan Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan berupa :
 - Pengembangan Ternak Sapi Bibit di Kawasan Peternakan sebanyak 560 ekor yang didistribusikan ke Kabupaten Paser 147 ekor, Penajam Paser Utara 143 ekor, Kutai Timur 120 ekor dan Kutai Kartanegara 150 ekor.
 - Pengembangan Ternak Sapi Bakalan di Kawasan Peternakan sebanyak 360 ekor yang didistribusikan ke Kabupaten Paser 98 ekor, Penajam Paser Utara 82 ekor, Kutai Timur 80 ekor dan Kutai Kartanegara 100 ekor.

- Pengembangan Ternak Sapi di Kawasan Peternakan Lahan Pasca Tambang sebanyak 195 ekor, yaitu Kutai Kartanegara 98 ekor dan Kutai Barat 97 ekor.

1.4.2. Permasalahan dan Solusi terkait agribisnis

a. Permasalahan

1. Permasalahan disektor perkebunan adalah terbatasnya infrastruktur yang dapat mendukung investasi di sektor perkebunan dan hilirisasi produk-produk perkebunan belum tertata dengan baik.
2. Belum adanya regulasi yang mendukung keterlibatan swasta melalui dana CSR dalam pengadaan ternak bibit, yang dapat membantu peningkatan populasi melalui pola integrasi sapi sawit dan reklamasi lahan eks tambang.
3. Usaha industri pengolahan hasil perikanan belum dapat bersaing dipasar dan mengalami penurunan ekspor karena mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku untuk diolah di Cold Storage yang tidak memenuhi kapasitas, dan kecenderungan petani maupun nelayan untuk lebih menjual Bahan baku kepada pembeli dari luar Kaltim dengan harga yang lebih mahal.

b. Solusi

1. Perlu upaya terobosan untuk meningkatkan investasi disektor perkebunan berupa percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung hilirisasi produk-produk perkebunan.
2. Integrasi program kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam upaya mendukung program 2 juta ekor sapi, serta

peningkatan peran swasta dan masyarakat melalui CSR Perusahaan Sawit, Pertambangan dan Kredit Perbankan.

3. Untuk meningkatkan produktivitas usaha industri pengolahan hasil perikanan diperlukan upaya antara lain :

- Pembinaan dan pemberdayaan para pembudidaya tambak, terutama merehabilitasi tambak-tambak yang rusak/tidak produktif agar bahan baku seperti udang dapat terpenuhi kembali.
- Perbaikan mutu produk yang lebih berkualitas terutama yang berorientasi ekspor, sehingga dapat meminimalisir penolakan ekspor.
- Dukungan regulasi peraturan daerah yang mampu mengawasi perdagangan bahan baku ekspor.

1.5. Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan

1.5.1. Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 8 :Peningkatan Produksi Pangan adalah melalui pelaksanaan 15 program dan 20 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp177,05 Milyar. Sasaran prioritas ini adalah Tercapainya Swasembada Pangan.

Tabel 4.22.
Program Kegiatan Prioritas terkait Peningkatan Produksi Pangan

Prioritas 8 : Peningkatan Produksi Pangan		
No	Program/Kegiatan	SKPD Pelaksana
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	DINAS PERTANIAN
1.1	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	
1.2	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	
2	Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	
2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	

3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
	3.1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	
	3.2	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	
4	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)		
	4.1	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	
5	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		
	5.1	Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan kemitraan perkebunan serta pengembangan kelapa sawit rakyat	DINAS PERKEBUNAN
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		
	6.1	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan		
	7.1	Revitalisasi dan Non Revitalisasi Serta Kemitraan Perkebunan	
8	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		DISNAKERTRANS
		Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	
		Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	
9	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		DINAS PETERNAKAN
		Pengembangan Agribisnis Peternakan	
		Pengembangan Perbibitan dan Budidaya	
		Pengembangan kawasan dan usaha peternakan	
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		
		Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	
11	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		
		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna (Inseminasi Buatan dan Embrio Transfer)	

12	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar		DINAS KELAUTAN PERIKANAN
		Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	
13	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	
14	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		
		Pembinaan , Perencanaan, dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
15	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan		
		Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018,dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian target prioritas 8 “Peningkatan Produksi Pangan” pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 88,82 %. Adapun capaian hasil pembangunan Prioritas “Peningkatan Produksi Pangan”, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan :
 - Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agribisnis, Jumlah Petani dan Nelayan yang mengikuti PENAS XIV 2000 Orang. Pengembangan Kawasan Hortikultura buah-buahan 445 Ha, Pengembangan Kawasan Hortikultura Tanaman Anggrek 5000 Pot, Screen House Anggrek Lokal 1 Unit, Demplot Hortikultura dalam Screen House 1 Unit, Pemeliharaan Kawasan Jeruk dan Durian/Lai 350 Ha (6.000 Pohon).
 - Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis melalui pengembangan kawasan hortikultura buah-buahan seluas 445 Ha; pengembangan kawasan hortikultura tanaman anggrek 20.000 potong; demplot hortikultura dalam *screen house* 1 unit; pemeliharaan kawasan jeruk dan durian/lai seluas 350 Ha, pembangunan Stasiun Terminal Agribisnis (STA) 3 unit di

Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau serta penyempurnaan STA sebanyak 3 unit Kabupaten Kutai Timur

- Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, Kelompok Wanita Tani yang Mengikuti Program KRPL180 KWT.
- Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis, Pelatihan PHT di 6 Kawasan Sentra Tanaman Pangan 150 Orang 7 Kawasan Sentra. Sosialisasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi 5 Kabupaten/Kota.

2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, melalui kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan, Jumlah BPP yang Fungsional 50 BPP/Kecamatan (90 Orang Penyuluh).
- Penyuluhan Dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan, Jumlah Pendampingan 8 Orang Pendamping, 300 Orang Petani.
- Pemberdayaan Dan Penuhuan Kelembagaan Petani Perkebunan berupa bimbingan dan pembinaan terhadap petani dan kelompok tani (kelembagaan petani) 115 petani.

3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), melalui kegiatan :

- Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, KWT/Dasawisma yang menerima bantuan bibit tanaman, pupuk, pestisida, polybag/tempat media tanaman dan Bibit Ternak/Ikan 24 Kelompok.
- Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, Jumlah CPP (Stok Beras Provinsi) 120 Ton.
- Pengembangan Lumbung Pangan Desa, Lumbung Pangan 17 Unit.
- Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dengan cara Optimasi Lahan 450 Ha Pintu Air 172 Unit, Jalan Usaha

Tani 41 Km, Jalan Produksi Hortikultura 4 Km, Survey Investigasi Desain (SID) Cetak Sawah 150 Ha.

- Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian berupa peningkatan SDM perlindungan perkebunan bagi petani dan petugas sebanyak 266 petani/petugas.
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan :
- Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna berupa Alat mesin pertanian 462 Unit, Pestisida 9.700 Liter/Kg, pupuk 1.620 Ton.
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan :
- Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan berupa Pengembangan tanaman padi varietas unggul lokal 240 Ha, Pengembangan tanaman ubi kayu 60 Ha, Pengembangan padi unggul nasional 120 Ha, Pengembangan padi hibrida 670 Ha, Pengembangan sentra produksi padi 50 Kecamatan (Benih Padi 7.000 Ha).
 - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan berupa Pengembangan penangkar benih unggul lokal 80 Ha, Pengembangan penangkar benih unggul nasional 120 Ha, Pengembangan penangkar benih kedelai 20 Ha, Fasilitas lantai jemur 15 Unit.
 - Pengembangan Dan Operasional PIR Swadaya Dan Kemitraan Perkebunan Serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat berupa Bibit kelapa sawit 97.500 batang, Pupuk NPK 75.000 Kg, Herbisida 3.750 Liter, kawat pengaman 96.000 potong untuk kebun sawit 750 Ha, Bibit Karet 262.500 batang, pupuk NPK 52.500 Kg, Herbisida 2.625 Liter untuk 525 Ha, Bimtek dan Sosialisasi.

- Intensifikasi Dan Rehabilitasi Kebun Lada, Karet, Kakao, Kelapa Dalam, Kopi berupa intensifikasi Kebun Lada 50 Ha, intensifikasi Kebun Kakao, intensifikasi Kebun Karet, intensifikasi Kebun Kelapa Dalam 225 Ha, intensifikasi Kebun Kelapa Sawit 300 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara serta pelatihan, pemberian pupuk dan pestisida kepada masyarakat.
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan, melalui kegiatan :
- Revitalisasi Dan Non Revitalisasi Serta Kemitraan Perkebunan berupa Bimtek petani plasma 20 orang, Bimtek kemitraan 40, Bimtek revitalisasi 30 orang di 5 Kabupaten/Kota.
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, melalui kegiatan:
- Pengembangan Pembibitan dan Budidaya yaitu ; Pengembangan Sapi Bibit 400 ekor di Kabupaten Berau dan Kutai Timur masing-masing sebanyak 200 ekor; Pengembangan Budidaya Ternak Sapi sebanyak 250 ekor di Kabupaten Kutai Barat 150 ekor dan Kutai Kartanegara 100 ekor; Pengembangan VBC Sapi sebanyak 550 ekor di Kabupaten Berau 100 ekor, Kutai Kartanegara 150 ekor, Kutai Timur 150 ekor dan Paser 150 ekor; Intensifikasi Optimalisasi Kawin Alam (INKA) sebanyak 70 ekor di Kabupaten Paser 20 ekor, Penajam Paser Utara 10 ekor, Kutai Kartanegara 20 ekor dan Kutai Timur 20 ekor.
 - Pengembangan Agribisnis Peternakan berupa pengadaan sapi bakalan melalui program penggemukan sapi sebanyak 166 ekor di Samarinda, Balikpapan dan Bontang.
8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, melalui kegiatan :
- Pembinaan, perencanaan dan pengembangan kelautan dan perikanan, dengan capaian Nilai tukar pelaku usaha kelautan dan perikanan (Nilai Tukar Nelayan) 99,33 NTN.
9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan :

- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perikanan, dengan capaian Volume produksi perikanan tangkap sebesar 138.881 Ton, dan meningkatnya Sarana Prasarana Tangkap antara lain; Mesin Ketinting ukuran 8 PK sebanyak 80 unit tersebar di Kabupaten Kukar sebanyak 20 unit, Kabupaten Kubar 20 unit, Kota Samarinda 10 unit dan Kab. Paser 30 unit; Mesin Ketinting ukuran 13 PK sebanyak 10 unit tersebar di Kabupaten Kutai Timur 5 unit dan Kota Balikpapan 5 unit; Mesin Ketinting, Perahu dan Alat Tangkap sebanyak 21 unit tersebar di Kabupaten Kubar 10 unit dan Kabupaten Paser 11 unit; Mesin Kapal ukuran 24 PK sebanyak 50 unit tersebar di Kabupaten Berau 20 unit, Kab. Penajam 10 unit, Kabupaten Paser 15 unit dan Kota Balikpapan 5 unit; Sarana penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan sebanyak 2 paket di Kabupaten Kutai Timur 1 paket dan Kabupaten Paser 1 paket; Mesin Kapal sebanyak 10 unit terdapat di Kota Balikpapan 5 unit dan Kota Samarinda 5 unit.; Alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon sebanyak 18 unit yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota; Alat tangkap Gill Net sebanyak 400 piece tersebar di 6 Kabupaten/Kota; Alat tangkap Jaring Millenium sebanyak 56 set untuk Kota Balikpapan; Alat tangkap Bubu sebanyak 300 buah untuk Kabupaten Nunukan; Kapal Penangkap Ikan < 5 GT sebanyak 27 unit tersebar di 5 Kabupaten/Kota.

10. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan, melalui kegiatan :

- Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan, berupa Pembinaan Masyarakat Pengolah di Kalimantan Timur dan Nilai ekspor komoditas perikanan 21.704.595 USD.

11. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar, melalui kegiatan :

- Peningkatan Dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar berupa Volume produksi perikanan budidaya sebesar 291.290 ton dan meningkatnya Sarana Prasana Budidaya berupa ; Kolam Terpal sebanyak 100 unit tersebar di 7 Kabupaten/Kota; Karamba sebanyak 65 unit tersebar di Kota Samarinda 27 unit, Kabupaten Kutai Kartanegara 15 unit dan Kabupaten Kutai Barat 23 unit; Bantuan benih ikan untuk masyarakat sebanyak 356.000 ekor; Bantuan pakan ikan untuk masyarakat sebanyak 26.500 kg.

12. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, melalui kegiatan :

- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun berupa Bangunan bendungan D.I. Semurut, Bangunan jaringan irigasi D.I Biatan, Bangunan jaringan irigasi D.I Labanan, dan Bangunan jaringan irigasi D.I Merancang.
- Pembangunan Jaringan Tata Air Daerah Rawa berupa Pembangunan daerah Rawa Tabalar Muara.
- Pembangunan Reservoir Bangunan Bendungan Marangkayu.

1.5.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Masalah lain yang dihadapi petani adalah terjadinya rantai pemasaran yang cukup panjang dari produsen ke konsumen, sehingga margin yang diterima petani rendah, sehingga secara ekonomis usaha taninya kurang menguntungkan.
2. Sumber Daya Manusia pertanian memiliki rata-rata tingkat pendidikan yang masih relatif rendah, hal ini

menghambat pada adopsi teknologi dan inovasi di Bidang Pertanian ditambah lagi dengan terbatasnya jumlah petani yang ada bila dibandingkan dengan potensi lahan yang tersedia.

3. Infrastruktur dilokasi pengembangan pertanian belum memadai sehingga produk pertanian rusak.
4. Masih rendahnya tingkat produktifitas yang disebabkan oleh tingkat kelahiran masih rendah yaitu sekitar 15 %, Adanya kecenderungan memotong sapi pada berat antara 250 -300 Kg yang sebenarnya masih bisa digemukkan hingga berat mencapai 400-600 Kg, Inseminasi Buatan (IB) belum bisa berjalan dengan baik akibat dari beberapa hal seperti satuan lokasi SPIB masih sangat luas dari jangkauan petugas, kemampuan petugas sebagian masih rendah serta kesadaran petani juga masih rendah.
5. Pembibitan Ternak masih menghadapi kendala antara lain sulitnya mencari sumber bibit karena adanya beberapa provinsi yang telah menghentikan pengeluaran bibit, bibit yang tersedia pada daerah sumber bibit kurang memenuhi kriteria bibit, banyak kasus kejadian penyakit yang menyebabkan kematian pada bibit ternak yang masuk.
6. Laporan perkembangan ternak pemerintah tidak dibuat secara teratur yang disebabkan antara lain lokasi penyebaran yang jauh dengan jumlah petugas yang terbatas, peran kelompok tani kurang aktif, sarana dan prasarana pendukung bagi petugas di lapangan untuk memantau dan membuat laporan perkembangan ternak.

b. Solusi

1. Untuk mengatasi penurunan populasi ternak antara lain melalui penyebaran / pengadaan ternak bibit yang bermutu, pengembangan usaha penggemukan, pengawasan pemotongan hewan betina produktif dan penerapan skala usaha yang ekonomis.
2. Untuk meningkatkan produktifitas antara lain melalui peningkatan kelahiran melalui program Inseminasi Buatan (IB), seleksi pejantan pada lokasi-lokasi dengan sistem mini ranch, menekan tingkat kematian ternak dan perbaikan pengelolaan pakan ternak.
3. Untuk menangani masalah perbibitan diharapkan, daerah dapat melakukan impor ternak bibit/sapi bunting.
4. Dalam upaya pengembangan usaha pertanian ke depan perlu adanya keterpaduan program baik internal maupun lintas sektoral.
5. Peningkatan keterampilan petani melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi petani.

Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata

2.1. Prioritas 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

2.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan adalah melalui pelaksanaan 3 program dan 4 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22,31 Milyar. Sasaran prioritas ini adalah Meningkatkan Pemanfaatan Energi Terbarukan.

Tabel 4.23.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

Prioritas 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan		
No	Program/Kegiatan	SKPD Pelaksana
1	Program Diversifikasi Bahan Bakar	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1.1	Pengembangan PLTS, PLTMH dan Biogas	
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan	
2.1	Pembinaan, Pengawasan dan Perencanaan Ketenagalistrikan	
2.1	Konservasi energi	DISNAK
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	
3.1	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat guna	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018,dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program kegiatan dalam urusan pilihan untuk pencapaian target prioritas 9 “Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan” pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 86,15%. Adapun capaian hasil pembangunan Prioritas 9 “Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan”, adalah sebagai berikut :

1. Program Diversifikasi Bahan Bakar, melalui kegiatan :

- Pengadaan PLTS, PLTMH dan Biogas dengan melakukan pengadaan PLTS tersebar sebanyak 744 unit kapasitas 80 Wp di Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Manor Bulatn Desa Rembayan sebanyak 94 unit, Kecamatan Muara pahu Desa Jerang Melayu sebanyak 73 unit dan Desa Tanjung Pagar sebanyak 166 unit, Kecamatan Damai Desa Muara Bomboy sebanyak 63 unit, Kecamatan Siluq Ngurai Desa Muara Kelawait sebanyak 40 unit,

Kabupaten Mahakam Ulu Kecamatan Long Hubung Desa Lutan sebanyak 159 unit dan Desa Sirau sebanyak 35 unit, Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Busang Desa Mekar Naru sebanyak 112 unit. Pengadaan PLTS terpusat sebanyak 1 unit kapasitas 58 kWp di desa Long Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Selain pelaksanaan pemasangan PLTS tersebar dan terpusat pada tahun 2014 juga dilaksanakan pembangunan Instalasi Biogas di Kabupaten Panajam Paser Utara sebanyak 20 unit di Kecamatan Babulu Desa Gunung Intan dan Desa Gunung Mulia masing-masing sebanyak 10 unit, di Kecamatan Muara Ancalaong Desa Long Poq baru Kabupaten Kutai Timur sebanyak 20 unit.

2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan, melalui kegiatan :

- Monitoring pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dimana progress pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Berau PLTU Tanjung Redeb 2x7MW progress 71.28%, Kota Balikpapan PLTU Kariangau 2x110MW Progers 84.40%, Kabupaten Kutai Kartanegara PLTU Senipah 2x41 MW Progres 100%, PLTU CFK unit 3 1x50 MW Progres 100%, PLTG Peaking 2x50-60 MW Progres 100%, SUTT 150 kV Tenggarong-Kota Bangun Progres 29.78%, SUTT 150 kV Palaran – Senipah Progres 41.71% GI Sembera Progres 100%, GI Kota Bangun Progres 25.60%, Kota Bontang SUTT 150 kV Sambutan – Bontang Progres 100%, Kabupaten Panajam Paser Utara GI Petung Progres 68.92% serta monitoring kondisi ketenagalistrikan Kalimantan Timur yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan, melalui kegiatan Pembinaan Pengawasan Dan Perencanaan Ketenagalistrikan.

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat

Guna, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam terbarukan melalui pemanfaatan kotoran ternak yang digunakan sebagai bahan baku instalasi biogas sebanyak 105 unit yang tersebar di 8 kabupaten /kota antara lain Paser 25 unit, PPU 15 unit, Kutai Barat 5 unit, Kutai Timur 20 unit, Kutai Kartanegara 15, Berau 20 unit, Bontang 2 unit dan Samarinda 3 unit. Dengan jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi biogas sebanyak 105 KK, dengan kriteria 1 (satu) KK mendapatkan 1 (satu) unit biogas.

2.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Diversifikasi bahan bakar dengan mengembangkan biomas masih menghadapi kendala keterbatasan bahan baku karena masih minimnya populasi ternak.
2. Keterbatasan tenaga/aparat peternakan di kabupaten/kota yang mendukung pengembangan teknologi biogas.
3. Pengembangan PLTS masih menghadapi kendala dalam mobilisasi pada daerah yang sulit dijangkau karena keterbatasan transportasi dan kurangnya upaya pemeliharaan oleh masyarakat pengguna.

b. Solusi

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternakan baik melalui pendidikan, pelatihan penjenjangan dan pelatihan teknis peternakan.dalam pengembangan teknologi biogas.
2. Peningkatan upaya bimbingan teknis kepada masyarkat dalam pemeliharaan instalasi PLTS yang sudah terbangun.

Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

3.1. Prioritas 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

3.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya

a. Program Kegiatan

Upaya pencapaian prioritas 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup adalah melalui pelaksanaan 5 program dan 9 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10,15 Milyar. Sasaran prioritas ini meliputi : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan; Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 4.24.
Program Kegiatan Prioritas terkait Peningkatan
Kualitas Lingkungan Hidup

Prioritas 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		DINAS KEHUTANAN
	1.1	Penanaman 1 Juta Batang Bibit	
	1.2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
	1.3	Rehabilitasi Hutan Mangrove	
2	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan		
	2.1	Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur	
	2.2	Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pelestarian Alam	
	2.3	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	
3	Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan		
	3.1	Pengurangan Emisi dan Defortasi dan Degradasi Hutan	
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan		DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
	4.1	Pengawasan Pertambangan Umum	
5	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi		
	5.1	Pemetaan Cekungan Air Tanah	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018,dan RKPD Tahun 2014

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi keuangan terkait pelaksanaan program kegiatan untuk pencapaian target prioritas 12 “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” pada Tahun 2014 rata-rata mencapai 89,76%. Adapun capaian hasil pembangunan “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”, adalah sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, melalui kegiatan :
 - Penanaman 1 Juta Batang Bibit berupa penanaman 150.000 batang bibit.
 - Rehabilitasi Hutan dan Lahan berupa pemeliharaan seluas 175 Hektar di Tahura Bukit Soeharto.
 - Total hutan yang direhabilitasi pada tahun 2014 seluas 83,860,54 Ha dengan bibit sebanyak 55.393.186 batang.
 - Rehabilitasi Hutan Mangrove berupa pemeliharaan tanaman mangrove seluas 45 hektar.
2. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan:
 - Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain; Kegiatan Koordinasi pengamanan hutan terdiri dari 7 tim di 7 kabupaten/kota; Operasi gabungan pengamanan terdiri dari 3 tim di 3 kabupaten/kota; Pemeriksaan indikasi pelanggaran pada areal kawasan hutan terdiri dari 1 tim di 1 kabupaten/kota; dan Monitoring perlindungan hutan dan pemeriksaan sarana dan prasarana perlindungan hutan terdiri dari 7 tim di Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
 - Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pelestarian Alam melalui kegiatan Pembinaan Petak Ukur Permanen (PUP) pada kawasan Hutan Produksi; Pembinaan Pengelolaan Konservasi Tanah Pada Kawasan Hutan Produksi; Pembinaan Pelestarian Plasma Nutfah; Pembinaan

Pembebasan Pohon Binaan; Inventarisasi Kawasan Konservasi dan Kawasan yang akan dijadikan Kawasan Konservasi; Inventarisasi Flora Fauna.

- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, melalui kegiatan Patroli Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 62 orang dalam setahun; Pembinaan/Penyegaran Regu Pemadam Kebakaran (RPK) sebanyak 12 orang; Tim Pembuatan Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 4 orang.
- Kondisi sektor kehutanan terus mengalami peningkatan reboisasi dan rehabilitasi melalui program Kaltim Green OMFIT (One Man Five Trees) yaitu penanaman pohon yang dilaksanakan semua pihak baik pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN/BUMS dan pihak lain. Program OMFIT dilaksanakan mulai tahun 2009 dengan jumlah tanaman sebanyak 46.641 batang hingga tahun 2013 sebanyak 47.198.772 batang, dan telah melebihi target nasional sebanyak 17.500.000 batang.

3. Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, melalui kegiatan:

- Pengawasan Pertambangan Umum di 64 perusahaan dengan melakukan Pengawasan Lingkungan Pertambangan pada wilayah IUP dan PKP2B Provinsi Kalimantan Timur seluas 4.11 juta hektar meliputi wilayah operasi produksi seluas 661,66 ribu hektar terdiri dari 29.64 ribu hektar lahan terganggu kumulatif, luas lahan reklamasi kumulatif 8,15 ribu hektar dan lahan revegetasi kumulatif 7,39 ribu hektar. Sedangkan lahan wilayah PKP2B Provinsi Kalimantan Timur seluas 911,20 ribu hektar dengan total luas lahan eksploitasi 727,23 ribu hektar, luas lahan terganggu kumulatif 73,43

ribu hektar, lahan reklamasi kumulatif 33,38 ribu hektar dan luas lahan revegetasi kumulatif 30,56 ribu hektar.

- Sampai dengan saat ini persen area yang direhabilitasi dari lahan terganggu melalui Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan, melalui kegiatan Pengawasan Pertambangan Umum telah dilaksanakan dengan total luas 41,541 ribu hektar berbanding 103,072 ribu hektar atau sebesar 40,30%. Dari pencapaian hasil kegiatan tersebut telah melampaui target RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dimana pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kalimantan Timur menargetkan untuk pengelolaan lingkungan pertambangan batubara sebesar 35% atau seluas 36,075 ribu hektar.
- pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pengawasan teknis pertambangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaku usaha pertambangan telah melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu kepada kaedah-kaedah good mining practice.
- Kegiatan Pengembangan sektor Pertambangan Umum di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 dilakukan untuk mengetahui pelaku usaha yang memiliki Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah diterbitkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur. Sampai dengan Tahun 2014 Ijin Perusahaan Jasa Penunjang yang diterbitkan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 256 Ijin.
- Kegiatan Evaluasi Good Mining Practice (GMP) pada perusahaan tambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur dengan melakukan pembinaan pada Program

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Comdev/ CSR) dengan menitikberatkan agar perusahaan tidak bertumpu pada profit semata namun juga diimbangi kepedulian terhadap lingkungan sosial yang berada disekitar lokasi tambang dengan mengembangkan potensi local masyarakat sekitar yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memacu ekonomi kerakyatan pada sekitar wilayah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

- Kegiatan Koordinasi dan Pendataan hasil produksi batubara dengan melakukan pengawasan dan pembinaan pada perusahaan PKP2B serta IUP di Provinsi Kalimantan Timur, dengan hasil luran Tetap sampai dengan bulan November 2014 sebesar 87,62 Milyar, luran Produksi 5,73 Triliyun dan Penjualan Hasil Tambang 6,45 Triliyun. Sedangkan Penerimaan PNBP pada Tahun 2014 untuk Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,1 triliyun sampai dengan bulan November tahun 2014.

4. Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi, melalui kegiatan:

- tersebut melakukan pembuatan sumur bor eksploitasi air tanah di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 2 sumur, sumur eksplorasi di Desa Tanjung Jone Kabupaten Kutai Barat sebanyak 1 buah dan peningkatan sumur air tanah dari sumur eksplorasi di Desa Tanjung Jone 1 buah, Desa Merandai Kota Samarinda 1 buah, Desa Sebakung Kabupaten Paser sebanyak 1 buah. Hingga saat ini jumlah sumur bor air

tanah sebanyak 35 buah sumur bor dan 3 buah sumur (pemanfaatan mata air).

3.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten/Kota melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan masih rendah dan tidak sebanding dengan laju kerusakan hutan dan lahan.
2. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada 9 IUP dan 9 PKP2B dengan kesimpulan rendahnya pengalokasian anggaran CSR pada masyarakat selama ini, perusahaan yang memberikan bantuan langsung berupa uang bukan merupakan program dan kegiatan sehingga target pelaksanaannya masih rendah, demikian juga usulan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut masih banyak untuk pembangunan fisik dan bukan untuk pemberdayaan masyarakat. Dikawatirkan pada akhir masa perusahaan beroperasi masyarakat disekitar tambang karena sangat tergantung dengan perusahaan maka tidak dapat meningkatkan perekonomiannya.

b. Solusi

1. Menyusun perencanaan yang lebih detail baik secara teknis maupun pembiayaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengurangi lahan kritis dan mengatasi dampak perubahan iklim.
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan perusahaan pertambangan dalam kerja sama pembangunan melalui CSR yang di fokuskan pada pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar areal pertambangan.